

**Desain Pengembangan Kurikulum Madrasah Berbasis Sistem
Kredit Semester**

(Studi Kasus di MTsN 2 Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Manajemen Pendidikan Islam



OLEH:

Dinar Nur Pangestu

NIM : 211216029

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

TAHUN AKADEMIK 2020

ABSTRAK

Pangestu, Dinar Nur. 2020. Desain Pengembangan kurikulum Madrasah Berbasis Sistem Kredit Semester (*Studi Kasus di MTs Negeri 2 Ponorogo*). **Skripsi.** Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Mukhibat, M.Ag.

Kata Kunci : Pengembangan Kurikulum, Program SKS

. Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) merupakan suatu proses penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum. Alasan penting pemerintah melaksanakan pengembangan kurikulum dalam program SKS sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dalam mengakomodasi kemajemukan peserta didik pada minat, bakat, dan kebutuhan dalam sekolah dibawah naungan Kemenag.

MTsN 2 Ponorogo merupakan madrasah tsanawiyah yang menerapkan program SKS pada tahun 2009 sampai sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang tahapan dalam penerapan Sistem Kredit Semester yang meliputi: studi kelayakan dan kebutuhan; penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum; pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum; pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan; pelaksanaan kurikulum; pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum; pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Peneliti menggali data berfokus pada rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan *Conclusion drawing/ Verivication*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:(1)Analisis kebutuhan memperhatikan minat, bakat dan kompetensi peserta didik dengan persyaratan peserta didik memperoleh nilai IP minimal 92 untuk masuk dalam kelas percepatan, adanya target madrasah kepada lulusan melanjutkan pendidikan dan diterima di sekolah favorit dan peserta didik terbangunnya karakter; Studi kelayakan meliputi beberapa pertimbangan yaitu Telah ditunjuk oleh dirjen Pendis sebagai madrasah percontohan di Jawa Timur, melaksanakan program SKS sudah lama, dan juga lolos dalam pemberkasan madrasah menerapkan program SKS.(2) Perencanaan kurikulum dengan kerangka kerja keputusan Dirjen Pendis Nomor 2851 Tahun 2019.(3)Pengembangan rencana melaksanakan kurikulum penyusunan silabus diatur dalam permendikbud nomor 22 Tahun 2016, pengembangan bahan ajar dengan UKBM dan sumber belajar melalui modul.(4)Pelaksanaan uji coba dilapangan tidak diterapkan.(5)Pelaksanaan kurikulum ditingkat sekolah kepala

sekolah dengan dibantu oleh para waka dalam menyusun RKT, RKAM, kalender akademik, penugasan guru dan pendamping akademik, mengelola sarpras, mengkoordinir pembelajaran guru menggunakan UKBM; ditingkat kelas Pendamping akademik untuk membimbing peserta didik dari awal semester sampai akhir semester.(6)Pemantauan kurikulum program SKS dilakukan secara terjadwal, sidak dan pembuatan LPJ setiap tahun, evaluasi meliputi efektivitas prosedur pelaksanaan program SKS, Tenaga pendidik, modul pembelajaran, teknik guru dalam mengajar dan juga adanya penilaian proses dan penilaian hasil atau produk.(7) perbaikan dan penyesuaian adanya feedback dari hasil pemantauan dan penilaian kurikulum program SKS mengenai hambatan yang dialami madrasah dalam penyelenggaraan SKS, nantinya di semester selanjutnya dilakukan perbaikan.



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama saudara :

Nama : DINAR NUR PANGESTU
NIM : 211216029
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Desain Pengembangan Kurikulum Madrasah Berbasis
Sistem Kredit Semester di MTs Negeri 2 Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 01 Juni 2020

Pembimbing



Dr. Mukhibat, M. Ag

NIP. 19731106 200604 1 017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. Muhammad Thoyib, M. Pd

NIP. 19800404 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESEAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : DINAR NUR PANGESTU
Nim : 211216029
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM
MADRASAH BERBASIS SISTEM KREDIT
SEMESTER (STUDI KASUS DI MTS NEGERI 2
PONOROGO)

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 September 2020

Dan telah diterima sebagai bahan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Pendidikan Islam, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Oktober 2020

Ponorogo, 2 November 2020

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,



Dr. AHMADI, M.Ag.

NIP. 196512171997031003

P O N O R O G O

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua Sidang : **Dr. AHMADI, M.Ag**
2. Penguji I : **Dr. MUHAMMAD THOYIB, M.Pd**
3. Penguji II : **Dr. MUKHIBAT, M.Ag**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinar Nur Pangestu

NIM : 211216029

Fakultas : Tarbiah dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi/Tesis : Desain Pengembangan Kurikulum Madrasah Berbasis Sistem Kredit Semester Studi Kasus di MTs Negeri 2 Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 November 2020

Penulis



(DinarNur Pangestu)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website: www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinar Nur Pangestu
NIM : 211216029
Fakultas : Tarbiah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi/Tesis : Desain Pengembangan Kurikulum Madrasah Berbasis Sistem Kredit
Semester Studi Kasus di MTs Negeri 2 Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 November 2020

Penulis,

Dinar Nur Pangestu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kemajuan suatu negara berawal dari kualitas pendidikannya.

Menurut UU Nomor 20 pasal 3 Tahun 2003 pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Kenyataannya menunjukkan bahwa program pendidikan masih belum mengarah pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional karena dalam beberapa sekolah negeri maupun swasta memberikan peserta didiknya program pendidikan yang bersifat klasikal-massal. Padahal sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional pada pasal 12 pada point b menyatakan “ setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya” selanjutnya pada point f menyatakan “ setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan program pendidikan

¹ “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Bidang Dikbud KBRI Tokyo, t.t.), 6.

sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.”²

Sesuai dengan UU RI No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 4, menegaskan bahwa, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Berdasarkan Permendikbud 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS), tidak akan terjadi ketimpangan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa untuk menyelesaikan program studinya tanpa harus terhambat oleh temannya yang lain demikian pula peserta didik yang memiliki kelemahan dalam proses percepatan penyelesaian program studinya, tidak akan terpaksa mengikuti pola belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih. Upaya ini dapat memenuhi pelayanan pendidikan yang adil dan efektif pada semua peserta didik.³

Kurikulum merupakan sarana dalam proses belajar mengajar yang dinamis dinilai secara berkesinambungan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan maka, perlu adanya pengembangan kurikulum yang mengacu pada standart nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum yang berkembang haruslah mengikuti

² Ibid., 8.

³ Agis Suna dan Dwi Wabula, “Implementasi Kebijakan Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) dengan Model Sistem Kredit Semester (SKS) di MTS Negeri 2 Kediri,” *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 1–2. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 12:08 WIB

perkembangan zaman. Persoalan mengembangkan kurikulum bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dalam pengembangan kurikulum di Madrasah untuk melayani peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa / bakat istimewa Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan program SKS di Madrasah.

Pada tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberitahukan bahwasanya, kelas Akselerasi akan dihapuskan pada penyelenggaraan ajaran 2015/2016. Karena seorang pengamat pendidikan mengungkapkan program akselerasi bisa mempengaruhi psikis murid, hal tersebut memang dinyatakan oleh Sultan salah satu siswa kelas akselerasi di SMAN 2 Tangerang Dia mengaku harus mengurangi kegiatan di luar bidang akademik. "Karena sistem belajarnya (aksel) ngebut juga, saya harus ngurangin kegiatan-kegiatan di luar belajar kayak ekstrakurikuler dan organisasi lain," . Ina Liem, seorang pengamat pendidikan sekaligus konsultan karier, mengemukakan ketidaksetujuannya pada program akselerasi karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah menengah yang lebih menekankan pada pendidikan karakter. Dia juga menambahkan, program akselerasi dapat memengaruhi psikis murid-murid yang dinilai belum terlalu matang. Sebagai contoh, dia memaparkan, murid usia 12-18 tahun adalah tahap pencarian jati diri. Apabila dia lulus SMA pada usia 15 tahun (lebih cepat dari umumnya), maka dia belum benar-benar

mengenal siapa dirinya, padahal sudah harus memilih jurusan. Sehingga dampak yang ditimbulkan bisa bermacam-macam.⁴

Walaupun kelas Akselerasi dihapuskan. Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Achmad Jazidie, mengatakan mengatakan kendati kelas percepatan itu dihapus, siswa cerdas istimewa dapat mempercepat masa studi dengan mengikuti sistem kredit semester (SKS). SKS untuk sekolah diberlakukan sama seperti halnya di perguruan tinggi.⁵ Dalam lingkup Kementerian Agama (Kemenag) terkhusus Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) mengeluarkan sebuah kebijakan terkait kebijakan tentang penghapusan Program Kelas Akselerasi. Maka, Dirjen Pendis mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan Program kelas PDCI, lalu di Tahun 2019 kebijakan Program kelas PDCI dirubah menjadi Program SKS *by School*, dengan nama kelas Percepatan. Ketentuan penyelenggaraan berbeda dengan sistem sebelum akan tetapi tidak menghilangkan tujuan dari penyelenggaraan Program SKS.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan Agama Islam, sehingga dalam proses dan bahan ajarnya melakukan diferensiasi demi menciptakan suatu kekhasan madrasah dibanding lembaga pendidikan lainnya.

⁴ “Pengamat Pendidikan: Program Akselerasi Bisa Memengaruhi Psikis Murid,” *kumparan*, diakses 30 September 2020, <https://kumparan.com/millennial/pengamat-pendidikan-program-akselerasi-bisa-memengaruhi-psikis-murid-1538137079141820340>. Diakses pada tanggal 30 September 2020 Pukul 07:49 WIB

⁵ Mariyana Ricky P.D, “KURIKULUM 2013 : Kelas Akselerasi Dihapus Tahun Depan, Ini Gantinya,” 9 Oktober 2014, <https://m.solopos.com/kurikulum-2013-kelas-akselerasi-dihapus-tahun-depan-ini-gantinya-543037>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2020 Pukul 14:10 WIB

Sejak tahun pelajaran 2014/2015 terdapat kurang lebih 50 madrasah yang telah menyelenggarakan SKS baik jenjang MTs dan MA. Kementerian Agama pusat telah mengadakan visitasi dan evaluasi, selanjutnya Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu untuk segera melakukan perbaikan dan penyempurnaan Pentunjuk Teknis Penyelenggaraan SKS pada madrasah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, serta melakukan pendampingan secara berkelanjutan.⁶ Memberikan layanan pendidikan yang efektif dan efisien terhadap kemajemukan peserta didik agar potensi yang mereka miliki terwadahi secara maksimal. Maka, muncullah kebijakan pelaksanaan program SKS di madrasah, akan tetapi tidak semua madrasah dapat diberikan kewenangan dalam pelaksanaannya. Madrasah yang memiliki izin operasional dalam pelaksanaan program SKS tercantum dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6633 Tahun 2019 tentang madrasah penyelenggara SKS.⁷

Di kabupaten Ponorogo sekolah yang dinyatakan lolos persyaratan untuk melaksanakan program SKS hanya 2 sekolah, dimana sekolah tersebut berada dibawah naungan Kemenag, yaitu MAN 2 Ponorogo dan MTsN 2 Ponorogo. Pelaksanaan SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo merupakan salah satu

⁶ Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian RI 2019, "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Tsanawiyah," t.t., 1-2.

⁷ Lihat transkrip Observasi Nomor: 04/O/20-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pelayanan dalam mengakomodasi kemajemukan peserta didik pada minat, bakat, dan kebutuhan. Program SKS yang berada di MTs Negeri 2 Ponorogo merupakan suatu pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Dirjen Pendis dalam jenjang sekolah menengah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Disampaikan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 2 Ponorogo perjalanan Madrasah sebelum dinyatakan sebagai sekolah percontohan untuk melaksanakan program SKS ialah “ Adanya kelas akselerasi atau dikenal dengan program SKS *by class* pada tahun 2009, kemudian adanya penunjukkan oleh Dirjen Pendis kepada MTs Negeri 2 Ponorogo sebagai madrasah percontohan, serta yang terakhir madrasah ini dinilai begitu memuaskan sehingga sekolah ini dinyatakan lolos dalam seleksi sebagai sekolah yang menerapkan program SKS *by School*”.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana desain kurikulum madrasah dalam program Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang sekolah menengah pertama yang merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan dibidang kurikulum untuk memenuhi kemajemukan kemampuan peserta didik. Untuk pengambilan lokasi penelitian di MTs Negeri 2 Ponorogo merupakan sekolah/ madrasah menengah pertama yang menggunakan program SKS di kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hal tersebut Penulis terdorong untuk

⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

melakukan penelitian dengan judul “ **Desain Pengembangan Kurikulum Madrasah Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) di MTsN 2 Ponorogo**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas peneliti. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti menfokuskan penelitian masalah dengan mengadopsi teori tahapan-tahapan pengembangan kurikulum dengan model “*The Administrative Model*” dari buku Zainal Arifin untuk pelaksanaan program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tahapan pengembangan kurikulum madrasah berbasis SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui tahapan pengembangan kurikulum madrasah berbasis SKS yang meliputi :

- a. Studi kelayakan dan kebutuhan

- b. Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum
- c. Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum
- d. Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan
- e. Pelaksanaan kurikulum
- f. Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum
- g. Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan terkait dengan desain pengembangan kurikulum madrasah berbasis Sistem kredit Semester (SKS) .

2. Manfaat praktis

a. Bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum di MTsN 2 Ponorogo .

b. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan pembelajaran melalui pengembangan kurikulum dikelas.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang teori dan praktik tentang desain pengembangan kurikulum madrasah berbasis SKS di MTsN 2 Ponorogo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian peneliti kelompokkan menjadi enam bab yang masing-masing bab terdiri sub bab yang berkaitan.

Sistematika pembahasan ini adalah:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori desain pengembangan kurikulum dan program sistem kredit semester.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus.

Bab kelima, merupakan pembahasan.

Bab keenam, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Konsep Desain Pengembangan Kurikulum

a. Pengertian Desain Pengembangan Kurikulum

Istilah kurikulum muncul pertama kalinya dan digunakan dalam bidang olahraga. Secara etimologis *curriculum* yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelajari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelajar dari garis *start* sampai jarak *finish*. Baru tahun 1855, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan yang mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi.⁹ Menurut Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa kurikulum dapat dilihat dalam tiga dimensi sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai rencana.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

⁹ Sholeh Hidayat, *Manajemen kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 19–20.

¹⁰ Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, *Pengelolaan Pendidikan Teori Menuju Implementasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 128.

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.¹¹

Menurut Oemar Hamalik kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat pengaturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.¹²

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa.¹³

¹¹ Muwahid Shulhan dan Soim, *Manajemen pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 52.

¹² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 91.

¹³ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: Kencana, 2010), 31.

Pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Kurikulum pada dasarnya berintikan empat aspek utama, yaitu tujuan pendidikan, isi pendidikan, pengalaman belajar dan penilaian.¹⁴

Pengembangan kurikulum sebagaimana Unruh katakan adalah proses yang kompleks terdiri dari berbagai kegiatan *meng-asses* kebutuhan, mengidentifikasi harapan hasil belajar, mempersiapkan proses pembelajaran untuk mencapai harapan *outcome* hasil belajar, dan menyesuaikan program pembelajaran dengan budaya, sosial, dan berbagai kebutuhan orang-orang yang untuk merekalah kurikulum tersebut disiapkan. Pengembangan kurikulum tersebut menjadi sangat signifikan dilihat dari sangat cepatnya perubahan sains dan teknologi yang digunakan dalam dunia usaha dan industri serta berbagai pasar tenaga kerja potensial lainnya, sehingga sekolah tidak tertinggal oleh berbagai kemajuan yang terjadi di luar sekolah.¹⁵

Ada empat tahap dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

- 1) Pengembangan Kurikulum Pada Tingkat Makro
(Nasional)

¹⁴ Hamdani Hamid, *Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 182–183.

¹⁵ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis : Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2007), 82.

Pada tingkat ini pengembangan kurikulum dibahas dalam ruang lingkup nasional yang meliputi Tri-Pusat Pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Secara vertikal, pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan tingkatan pendidikan atau sekolah, seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan perguruan tinggi. Secara horizontal, pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan jenis pendidikan atau sekolah yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan program paket A.

2) Pengembangan Kurikulum Pada Tingkat Institusi (Sekolah)

Pengembangan kurikulum tingkat institusi/lembaga mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu merumuskan tujuan sekolah atau standar kompetensi lulusan masing-masing lembaga, penetapan isi dan struktur program, dan penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi lulusan yang dimaksud adalah rumusan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang diharapkan dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan keseluruhan program pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.

Misalnya, standar kompetensi lulusan SD, SMP, SMA, UPI dan sebagainya. Sumber yang digunakan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan adalah sekolah masing-masing sesuai dengan jenis dan tingkatannya.

Standar kompetensi lulusan menunjukkan harapan masyarakat, seperti orang tua, pejabat-pejabat pemerintah dan swasta tentang dunia pendidikan, dunia usaha, dan lain-lain, serta merupakan harapan bagi sekolah yang lebih tinggi atau dunia kerja. Misalnya, sesudah tamat SMA, orang tua berharap agar putra-putrinya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau masuk dunia kerja. Standar kompetensi lulusan hendaknya dirumuskan sedemikian rupa sehingga tingkat kekhususannya berada di antara tujuan pendidikan nasional dengan standar kompetensi mata pelajaran (bidang studi). Penetapan isi adalah penetapan materi atau bahan pelajaran, sedangkan penetapan struktur program mencakup penetapan jumlah dan jenis-jenis mata pelajaran sistem semester, serta alokasi waktu yang diperlukan. Adapun penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum, antara lain meliputi menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya (pustakawan, ahli, media, tata usaha), menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan pembelajaran, mengadakan penilaian,

mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dan melaksanakan administrasi sekolah.

3) Pengembangan Kurikulum Pada Tingkat Mata Pelajaran (Bidang Studi)

Pengembangan kurikulum pada tingkat bidang studi ini dilakukan dalam bentuk menyusun atau mengembangkan silabus bidang studi mata pelajaran untuk setiap semester. Silabus suatu bidang studi berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, sistem penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/ alat belajar. Pengembangan silabus harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, antara lain ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konstektual, fleksibel, dan menyeluruh. Pengembangan silabus dapat dilakukan baik oleh guru, secara mandiri, berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pusat Kegiatan Guru (PKG) maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus adalah

- a) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar;
- b) Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran;
- c) Mengembangkan kegiatan pembelajaran;

- d) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi;
- e) Menentukan jenis penilaian;
- f) Menentukan alokasi waktu; dan
- g) Menentukan sumber belajar.

Pada akhirnya silabus ini akan digunakan oleh guru sebagai pedoman dan acuan utama dalam mengembangkan program pembelajaran.

4) Pengembangan Kurikulum Pada Tingkat Pembelajaran di Kelas

Untuk mengembangkan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas, maka guru perlu menyusun program pembelajaran, seperti paket modul, paket belajar, paket berprogram, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Secara garis besar, RPP tersebut terdiri atas identitas mata pelajaran, topik/materi pokok, kelas dan semester, waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alat/media/sumber, dan penilaian. Berdasarkan RPP tersebut, guru diharapkan dapat mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien.¹⁶

¹⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 41–43.

pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan secara terpadu dan berjenjang, sebagai berikut.

- 1) Tingkat makro; Pengembangan kurikulum didukung oleh berbagai disiplin ilmu kealaman, ilmu sosial, dan ilmu perilaku yang masing-masing menganut hukumnya sendiri. (hukum kausalitas, hukum normatif, dan hukum probabilitas)
- 2) Tingkat struktural; Pengembangan kurikulum melibatkan peran serta berbagai pihak secara intersektoral dan antarinstusional baik dalam lingkungan pendidikan maupun nonpendidikan, yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- 3) Tingkat mikro; Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara sistemik yang memuat semua komponen, lengkap, utuh, menyeluruh, konsisten, dan serasi dengan faktor-faktor yang mendasarinya.
- 4) Tingkat individual; Pengembangan kurikulum mengacu dan melibatkan semua individu secara interaktif dan komunikatif dalam proses pembelajaran agar tercapai hasil belajar yang dapat diamati secara terukur.¹⁷

¹⁷ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 15–16.

b. Model-model pengembangan kurikulum¹⁸

Robers S Zais (1976) dalam bukunya “curriculum: prociples and foundations” mengemukakan delapan model pengembangan kurikulum. Secara singkat, model-model tersebut akan dikemukakan sebagai berikut :

1) The Administrative (Line-Staff) Model

Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal adalah model administratif karena model ini menggunakan prosedur garis-staf atau garis-komando dari atas ke bawah. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi (Kemendiknas), kemudian secara struktural dilaksanakan ditingkat bawah.

2) The Grass-Roots Model

Inisiatif pengembangan kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus.

3) The Demonstation Model

Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum.

4) Beauchamp’s System Model

¹⁸ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, 138–43.

Sistem yang diformulasikan oleh G.A Beauchamp dalam bukunya “curriculum Theory”, 3d.ed., mengemukakan adanya lima langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum yaitu:

- a) Menentukan area pengembangan kurikulum;
 - b) Penentuan orang-orang yang terlibat disesuaikan dengan area pengembangan kurikulum;
 - c) Pengorganisasian;
 - d) Pelaksanaan kurikulum secara sistematis;
 - e) Evaluasi kurikulum;
- 5) Taba’s Inverted Model

Hilda Taba mengembangkan lima langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu :

- a) Kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk diekperimenkan;
 - b) Uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran;
 - c) Merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum;
 - d) Mengembangkan kerangka kerja teoretis;
 - e) Pengasemblingan dan desiminasi hasil yang telah diperoleh.
- 6) Roger’s Interpersonal Relations Model

Model ini berasal dari seorang psikolog Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka

mengembangkan individu yang terbuka, luwes dan adaptif terhadap situasi perubahan.

7) The Systematic Action-Research Model

Langkah-langkah dalam model ini adalah

- a) Merasakan adanya suatu masalah dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam;
- b) Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya;
- c) Merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalahnya;
- d) Menentukan keputusan-keputusan apakah yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut;
- e) Melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun;
- f) Mencari fakta secara meluas;
- g) Menilai tentang kekuatan dan kelemahannya.

8) Emerging Technical Model

Model teknologis ini terdiri atas tiga variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer.

c. Mekanisme Pengembangan Kurikulum

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap satu: studi kelayakan dan kebutuhan

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum, melakukan perumusan berbagai pertimbangan melalui kebijakan yang berlaku dan menganalisis kebutuhan. Secara teoritis Analisis kebutuhan dapat dilakukan terhadap: (a) kebutuhan peserta didik, terutama aspek perkembangan psikologis, seperti bakat, minat, dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki, baik kompetensi akademik, kompetensi sosial, kompetensi personal, maupun kompetensi vokasional; (b) kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; (c) kebutuhan pembangunan (nasional dan daerah). Studi kelayakan meliputi program yang akan dikembangkan, rasional pengembangan, rumusan deskripsi tugas secara umum, analisis tugas secara khusus, rumusan kemampuan yang akan dikembangkan, analisis kebutuhan program sesuai dengan rumusan kemampuan yang akan dikembangkan.¹⁹

2) Tahap dua: Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum

Konsep awal ini dirumuskan berdasarkan rumusan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistematis.

3) Tahap tiga: Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum

Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran dan sumber-sumber material lainnya.

¹⁹ Ibid., 43.

4) Tahap empat : Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan

Pengujian kurikulum di lapangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keandalannya, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilannya, hambatan dan masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor pendukung yang tersedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum.

5) Tahap lima : Pelaksanaan kurikulum

Ada 2 kegiatan yang perlu dilakukan, ialah :

- a) Kegiatan desiminasi, yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas.
- b) Pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama.

6) Tahap enam : Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum

Selama pelaksanaan kurikulum perlu dilakukan penilaian dan pemantauan yang berkenaan dengan desain kurikulum dan hasil pelaksanaan kurikulum serta dampaknya.

7) Tahap tujuh : Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian

Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan

penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Perbaikan dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut.²⁰

Menurut Arich Lewy (1977) tahap-tahap pengembangan kurikulum meliputi berikut ini :

1) Penentuan Tujuan Umum

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum merumuskan tujuan umum kurikulum yang berisi nilai-nilai dan perangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan kurikulum. Dalam merumuskan tujuan ini, para pengembang kurikulum tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan para ahli disiplin ilmu termasuk psikolog, sosiolog, antropolog, dan pakar-pakar ilmu lainnya yang relevan. Pakar-pakar ini dianggap mampu memberikan kontribusi pemikirannya untuk merumuskan tujuan umum kurikulum.

2) Perencanaan

Berdasarkan tahap kesatu di atas, selanjutnya pengembang kurikulum menyusun perencanaan kurikulum, mulai dari perencanaan umum (silabus) sampai dengan perencanaan khusus (RPP) dalam berbagai kegiatan (intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler) sesuai dengan organisasi kurikulum yang diinginkan. Perencanaan ini meliputi bahan/materi pembelajaran, strategi penyampaian,

²⁰ Ibid., 142–143.

sistem penilaian, sarana dan prasarana, biaya serta cara-cara penyampaian kepada guru-guru agar mereka dapat menggunakannya. Untuk itu, tim pengembang kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip utama dalam perencanaan, yaitu :

- a) Semua materi pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan kemajuan Iptek ,
- b) Proses pembelajaran harus serasu dan tepat sesuai dengan tujuan yang inginkan di capai, dan
- c) Sistem penilaian yang digunakan harus menggambarkan profil kemampuan peserta didik yang sesungguhnya.

3) Uji Coba dan Revisi

Tujuan umum uji coba adalah untuk menguji perencanaan yang telah disusun sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di lapangan sehingga perencanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan khusus uji coba yang dilakukan secara terbatas ini adalah untuk melihat kelemahan atau kekurangan dari perencanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan (revisi). Dalam uji coba ini, pengembang kurikulum dapat melakukan observasi langsung di kelas dan/ atau meminta pendapat dari peserta didik tentang pengalaman belajar mereka selama mengikuti kurikulum baru. Begitu juga

pendapat dari para pakar pendidikan, pakar psikologi, pakar bidang studi, dan lain-lain termasuk kepala sekolah, guru dan orang tua.

4) Uji Lapangan

Hasil uji coba terbatas adalah diperolehnya kurikulum yang lebih baik. Berdasarkan kurikulum ini kemudian dilakukan kembali uji lapangan yang lebih luas, yang hampir mirip dengan situasi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menganalisis kondisi-kondisi pelaksanaan kurikulum agar diperoleh hasil yang lebih memadai dan sempurna. Untuk itu harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan kurikulum itu sendiri, seperti kondisi dan kualifikasi guru, kondisi peserta didik, manajemen kurikulum, situasi dan kondisi sekolah serta lingkungan terdekatnya, dan keadaan sosial ekonomi.

5) Pelaksanaan Kurikulum

Setelah kurikulum dilakukan uji lapangan, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan kepada kepala sekolah dan guru-guru secara bertahap dan kontinu, maka selanjutnya kurikulum siap dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah dalam negara itu secara *uniform*. Meskipun demikian, bukan berarti pada tahap ini tidak ada penilaian Tim pengembang kurikulum dan para pakar akan terus melakukan evaluasi, sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian. Semua pihak yang

terkait (pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya) harus bekerja sama untuk membantu pelaksanaan kurikulum.

6) Pengawasan Mutu Kurikulum

Kurikulum itu sifatnya dinamis yang akan terus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Jika suatu kurikulum dianggap sudah banyak memiliki kelemahan dan kekurangan, maka perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan kurikulum. Untuk itu, pengawas mutu kurikulum merupakan tahap penting yang harus dilakukan.²¹

2. Program Sistem Kredit Semester

Berdasarkan lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Mengenai pedoman umum pembelajaran²² disebut bahwa konsep Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Beban belajar

²¹ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, 45–46.

²² Salis Irvan Fuadi, "Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Sistem Kredit Semester (SKS)," *PARAMUROBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2018): 74. (Diakses pada 25 Januari 2020 pukul 14:49)

satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.²³

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Unit pembelajaran utuh disebut juga dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri yang selanjutnya kita sebut UKBM. UKBM merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah sampai ke yang sulit. UKBM tersebut memuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah ditentukan. Dalam UKBM disamping sebagai pelabelan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan diharapkan juga memberikan dampak pengiring terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad 21 seperti berfikir kritis, bertindak kreatif, bekerjasama, berkomunikasi dan lainnya.²⁴

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada jenjang madrasah di Indonesia saat merupakan suatu keniscayaan untuk dikembangkan dalam kerangka pengembangan inovasi dan kreativitas

²³ Abdurrahman Wahid, "Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2016): 24. (Di akses pada 25 Januari 2020 pukul 14:50)

²⁴ Vicky Adi Primajaya dan Nanik Indahwati, "Pengembangan UKBM Berbasis Identifikasi KD dan Pengambilan Semester pada Mata Pelajaran PJOK Jenjang SMA yang Mengimplementasikan Sistem Kredit Semester," *Jurnal Teladan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2019): 137. (Di akses pada 30 Januari 2020 pukul 17:00)

pembelajaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.²⁵

Tujuan utama penyusunan kurikulum berbasis SKS ini adalah untuk memberikan peluang secara khusus bagi siswa yang mempunyai keunggulan dalam kecepatan belajar dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan karakternya. Sehingga memungkinkan siswa melalui SKS dapat menyelesaikan belajar hanya dengan 4 semester saja yang seharusnya ditempuh dalam waktu belajar 3 tahun maupun dapat pula diselesaikan selama 8 semester bagi siswa yang lebih lambat belajarnya.²⁶

prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum model penyelenggaraan Sistem Kredit Semester sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pemerintah dalam mengembangkan kurikulum, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Relevansi, kurikulum sebagai pedoman akan membawa siswa untuk dapat memaknai hidup sesuai dengan aturan hidup yang ada di masyarakat dan membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

²⁵ Achmad Muhlis, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum dengan Model Sistem Kredit Semester di Madrasah," *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2016): 123–124. (Di akses pada 25 Januari 2020 pukul 16:00)

²⁶ Eko Supriyanto, "Model Penguatan Sekolah Madrasah Untuk Melayani Siswa Berkecerdasan Tinggi Melalui Implementasi Pembelajaran Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS)," *Profetika Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (1 September 2017): 16, doi:<https://doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5294>. (Di akses pada 30 Januari 2020 pukul 17:15)

masyarakat. Oleh karenanya dalam penyusunan kurikulum yang didapat melalui pengalaman belajar siswa, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan inilah yang dinamakan prinsip relevansi. Relevansi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal.

- 1) Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum.
- 2) Relevansi eksternal memiliki makna bahwa antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum seyogyanya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Menurut Wina dalam pengembangannya relevansi eksternal terbagi menjadi tiga: Pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya isi kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Misalnya untuk siswa yang tinggal di perkotaan perlu dikenalkan kehidupan lingkungan perkotaan seperti bagaimana cara menyeberang yang baik pada zebra cross, pelayanan jasa, diantaranya pembayaran air, listrik, telepon baik secara manual maupun online dan sebagainya. Kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan

yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu juga apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. Ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Artinya, bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Misalnya pembelajaran Internet yang diajarkan pada siswa, memiliki tujuan bahwa suatu saat nanti apa yang telah diajarkan dapat memberikan manfaat di masyarakat, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi.

- b. Prinsip Fleksibilitas, prinsip ini lebih menekankan tentang perlunya sifat fleksibel atau kelenturan, prinsip ini dirasa perlu karena bias jadi apa yang kita harapkan dalam kurikulum ideal tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat artinya kurikulum harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut Wina dalam Budiardjo menyebutkan bahwa prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi: Pertama, fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi. yang ada. Kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa.
- c. Prinsip Kontinuitas, kontinuitas yang dimaksud disini adalah berkesinambungan, artinya perkembangan proses belajar itu tidak terputus-putus tapii berkesinambungan-terus menerus. Oleh

karenanya pengalaman yang meski ada dalam isi kurikulum harus memperhatikan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Untuk itu pengembangan kurikulum meski dilakukan secara bersama-sama antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang pendidikan sekolah dasar, jenjang SLTP jenjang SLTA, dan pengembang kurikulum pada perguruan tinggi.

- d. Praktis (Efisiensi), kurikulum praktis dikatakan baik jika memenuhi prinsip efisiensi yang berhubungan dengan tenaga, waktu, sarana, dan biaya yang dikeluarkan semurah mungkin dan hasil yang diperoleh dapat maksimal. Karena sehebat dan seideal-idealnya kurikulum namun jika peralatan, sarana dan prasarana sangat mahal harganya, maka kurikulum tidaklah praktis dan akan sulit untuk di implementasikan, oleh karenanya kurikulum mestinya harus dirancang untuk dapat digunakan dalam situasi apapun (keadaan terbatas).
- e. Efektivitas, kurikulum disamping harus murah dan sederhana, bukan lantas mengindahkan faktor keberhasilan yang ingin dicapai dari kurikulum itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena pengembangan kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Menurut Wina dalam Budihardjo bahwa prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum.

Pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar.²⁷

B. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang desain pengembangan kurikulum madrasah berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) yang memiliki kaitan dengan inovasi pendidikan terkhusus dalam bidang kurikulum telah dilaksanakan oleh peneliti lain, Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat relevansi dan perbedaan titik fokus dan hasil yang dikaji agar peneliti tidak dianggap mencontoh penelitian yang sudah ada. Maka, disini akan dijelaskan mengenai perbedaan, fokus penelitian dan hasilnya.

Indra Moesthafa dengan judul thesis “Manajemen kurikulum sistem kredit semester dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo” (2017). Rumusan masalah dalam penelitian tersebut meliputi : proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan implikasi. Dalam proses perencanaan kurikulum program SKS di SMAN 1 Probolinggo para *Stakeholder* menyiapkan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program SKS, berbagai macam media, sarana dan prasarana; menyiapkan rencana pemetaan mata pelajaran dan KD setiap semesternya; menentukan alokasi waktu; menentukan tujuan pembelajaran dan

²⁷ Muhlis, “Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum dengan Model Sistem Kredit Semester di Madrasah,” 122–23.

mengidentifikasi materi pembelajaran untuk siswa; Mendesain kegiatan pembelajaran; menentukan strategi dan jenis penilaian yang digunakan, dan membantu siswa menyusun KRS. Dalam pelaksanaan kurikulum Sistem Kredit Semester kepala sekolah mengembangkann kurikulum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana; kepala sekolah memberikan arahan tentang pelaksanaan kurikulum; kepala sekolah memberikan solusi kepada guru jika terdapat kesulitan dalam praktik pembelajaran; guru melaksanakan pembelajaran, Evaluasi kurikulum Sistem Kredit Semester yang dilakukan di SMAN 1 Probolinggo yaitu : melalui rapat bersama wakil kepala bidang kurikulum, monitoring, supervisi, laporan evaluasi. Implikasi manajemen kurikulum Sistem Kredit Semester dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo yakni : Nilai-nilai siswa SMAN 1 Probolinggo ini tinggi di ketiga aspek yang menjadi penilaian, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan; manajemen kurikulum Sistem Kredit Semester memotivasi siswa untuk meningkatkan belajar; manajemen kurikulum Sistem Kredit Semester mengakomodasi kemampuan serta kecepatan belajar siswa; manajemen kurikulum Sistem Kredit Semester memberikan dampak psikologis, fisiologis, dan kognitif bagi siswa.²⁸ Dari uraian tersebut terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada fokus masalah, rumusan masalah, dan lokasi penelitian. Penelitian oleh Indra Moestafa leboh menekankan pada fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan implikasi manajemen kurikulum

²⁸ Indra Moesthafa, “Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

dengan program SKS di SMAN 1 Probolinggo. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti untuk lokasi penelitian berada di sekolah madrasah sedangkan fokus penelitian pada tahapan perkembangan kurikulum program SKS meliputi : studi kelayakan dan kebutuhan; penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum; pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum; pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan; pelaksanaan kurikulum; pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum; pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Dimana disetiap tahapannya memiliki penjelasan tersendiri.

Mukhammad Iman Nafia dengan judul skripsi “ Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus” (2017) dapat diambil kesimpulan yaitu implementasi Sistem Kredit Semester sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari seluruh komponen yang ada saling mendukung.²⁹ Fokus penelitian yang dilakukan Iman Nafia adalah penerapan program SKS di SMA Negeri 1 Kudus dengan rumusan masalah yaitu : bagaimana implementasi Sistem Kredit Semester; Kendala dan solusi Sistem Kredit Semester. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kudus. Sedangkan, peneliti melaksanakan penelitian di Madrasah tsanawiyah dengan fokus permasalahan pada tahapan pengembangan kurikulum.

Telaah penelitian terdahulu memberikan gambaran perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang dilakukann oleh peneliti. Jika sebelumnya sudah dideskripsikan pada perbedaanya. Maka terdapat kesamaan dalam

²⁹ Mukhammad Iman Nafia, “Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus” (PhD Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2017), viii.

penelitian di MTs Negeri 2 Ponorogo, persamaan tersebut pada obyek penelitian yaitu pelaksanaan kurikulum dalam Program SKS. Yang pada dasarnya merupakan suatu program unggulan yang dimiliki beberapa sekolah atau madrasah di Indonesia, inovasi pengembangan kurikulum dan upaya meningkatkan mutu sekolah tersebut dengan adanya kelas unggulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan cara analisis yang bersifat deskriptif. Peneliti memperoleh data dari orang dan perilaku yang diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Bogman dan Taylor dalam lexy J.Moleong menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁰ Metode ini secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.³¹

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik dan utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.³² Sesuai dengan tindakan peneliti yaitu mengumpulkan informasi dengan cara berbicara secara langsung ke narasumber dengan menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya dan menyaksikan lingkungan sekeliling.

Peneliti memilih jenis penelitian studi kasus instrumen tunggal, dengan menfokuskan pada kegiatan mengeksplorasi isu atau permasalahan

³⁰ Cholid Narbuko dan Habu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 25.

³¹ Lexy J dan Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

³² *Ibid.*, 4.

dibatasi oleh tempat dan waktu. Sebagai rancangan penelitian, studi kasus memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri dalam kancan penelitian sosial. Secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. Itulah kekuatan utama sebagai karakteristik dasar studi kasus. Secara lebih rinci studi kasus mengisyaratkan keunggulan-keunggulan berikut:

1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
2. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya.
3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.³³

Adanya kajian yang mendalam tidak hanya berasal dari kajian teori tentang Desain Pengembangan Kurikulum dan Program Sistem Kredit Semester melainkan juga melaksanakan penelitian langsung ke lokasi yang

³³ Abdul Aziz, "Memahami fenomena sosial melalui studi kasus," *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 2003, 22–23.

diteliti, mengeksplorasi kehidupan nyata dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, melibatkan berbagai sumber informasi majemuk berupa kegiatan pengamatan, hasil wawancara berupa rekaman/ audio, dan dokumen yang terkait program SKS.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ialah sebagai peran utama. Peneliti sebagai perencana, pelaksana, pencari data, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pelapor hasilnya. Menurut Bogda dan Biklen memaparkan dengan jelas bahwa manusia sebagai instrumen kunci adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama.³⁴

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dengan waktu yang telah ditentukan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendahuluan. Peneliti mendatangi lokasi penelitian guna mengantarkan surat izin penelitian ke bagian Tata Usaha pada tanggal 12 Februari 2020. Selanjutnya menunggu persetujuan melakukan kegiatan penelitian di MTs 2 Ponorogo melalui pesan tertulis oleh bagian Tata Usaha. Rentang waktu menunggu persetujuan penelitian, peneliti melakukan observasi secara tidak langsung melalui via online kepada salah satu guru MTs Negeri 2 Ponorogo terkait Program SKS di MTs 2 Ponorogo. Setelah mendapatkan persetujuan penelitian pada tanggal 8 Maret 2020, selanjutnya pihak Tata Usaha mengarahkan peneliti untuk melakukan konfirmasi penelitian ke

³⁴ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 173.

Waka Humas selaku bidang yang diberikan tugas oleh Kepala Madrasah untuk melakukan bimbingan kepada pihak luar (peneliti) terkait penelitiannya di lokasi MTs Negeri 2 Ponorogo. Waka Humas menanyakan peneliti terkait topik yang akan diteliti oleh peneliti di lokasi tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam penggalan data oleh peneliti, berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menunjang laporan penelitiannya dan juga menanyakan topik terkait program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo. Setelah melakukan konsultasi terkait pelaksanaan penelitian di MTs Negeri 2 Ponorogo, peneliti diarahkan oleh Waka Humas untuk melakukan janji dan bertukar nomor telepon guna melakukan janji untuk wawancara kepada pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo.

2. Pelaksanaan. Melakukan proses interview/ wawancara kepada pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Program SKS. Proses wawancara yang pertama dilakukan kepada Ketua Penyelenggara Program SKS bu Ririen Muranti. Dalam kegiatan secara langsung kepada beliau dilakukan dua pertemuan. Pertemuan pertama peneliti melakukan wawancara terkait perencanaan Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo. Pertemuan yang kedua terkait pelaksanaan dan evaluasi Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi seperti melihat-lihat dokumen yang berada di ruang kesekretariatan Program SKS dan juga meminta data terkait pengembangan Program SKS. Pertemuan selanjutnya, melakukan wawancara kepada Waka Kurikulum dan juga meminta data terkait penyelenggaraan program SKS yang terbaru.

Setelah itu, melakukan kegiatan wawancara kepada Kepala Madrasah tentang program penyelenggaraan SKS. Pada tahap selanjutnya, peneliti seharusnya melakukan interview kepada beberapa guru Sehubungan dengan munculnya wabah pandemi corona sehingga madrasah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui Daring, sehingga peneliti merasa kesulitan dalam melaksanakan penelitian berupa observasi. Peneliti diminta untuk melakukan penelitian via online. Sehingga informasi yang didapat belum mendetail, untuk memperkuat informasi yang diberikan maka dilakukan wawancara kepada beberapa murid. Selain melakukan penggalian data melalui wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan penggalian data terkait visi misi tujuan madrasah, sejarah berdirinya madrasah, letak geografis madrasah, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, struktur organisasi melalui via online yaitu mencari di website sekolah dan juga laporan penelitian di MTs Negeri 2 Ponorogo terdahulu.

3. Melakukan permohonan surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di MTs Negeri 2 Ponorogo sebagai bukti telah melakukan penelitian di tempat tersebut.³⁵

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di MTsN 2 Ponorogo yang terletak di Jln. Ki Ageng Mirah Nomor 79 Plampitan, Setono,

³⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 07/O/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Jenangan, Ponorogo. Alasan peneliti memiliki lokasi ini ialah karena madrasah ini merupakan Madrasah Tsanawiyah satu-satunya di Ponorogo yang menerapkan program SKS sejak lama dan juga telah dijadikan sebagai madrasah percontohan di Jawa Timur oleh Dirjen Pendis. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan suatu kegiatan peneliti dalam mencari dimana data yang diperoleh berasal dengan cara menggali informasi dari informan ataupun dengan melakukan pengamatan. Bersumber dari data tunggal, kemudian peneliti meninjau kembali seluruh data tersebut dan memberikan pemaknaan, mengorganisasikannya menjadi beberapa kategori atau tema yang melintasi semua sumber data.³⁶

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian berupa kata-kata yang dikemukakan informan terkait pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dalam bentuk catatan, dan rekaman di *tape recorder*, Hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dokumen- dokumen yang diminta peneliti kepada informan atas persetujuan informan. Selain Memperoleh data secara langsung peneliti juga mencari data melalui via internet mencari data-data terkait Pelaksanaan Program SKS MTs Negeri 2 Ponorogo melalui website sekolah, jurnal dan artikel terbaru.

³⁶ John W Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, 3 ed. (Indonesia: Pustaka Pelajar, 2015), 61.

Proses penggalan data dengan menggunakan *Purpose Sampling* yaitu orang yang diwawancarai peneliti merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang penyelenggaraan Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari manusia dan non-manusia. Dari manusia sendiri berupa hasil wawancara secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan peneliti kepada informan. Sumber data non-manusia berupa dokumen-dokumen yang terkait penyelenggaraan Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo.

Adapun kegiatan penggalan data dilakukan kepada :

1. Kepala Madrasah MTs Negeri 2 Ponorogo
2. Waka Kurikulum MTs Negeri 2 Ponorogo
3. Ketua Program Kelas Percepatan dan Bilingual
4. Pembimbing Akademik Kelas 7L
5. Siswa Kelas PDCI dan Percepatan
6. Staff Tata Usaha MTs Negeri 2 Ponorogo

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi/ pengamatan

Dalam buku metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D, Marshall menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Sanafiah Faisal mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*Participant Observation*) observasi yang secara terang-

terangan dan tersamar (*Over Observation and Covert Observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*Unstructured Observation*).³⁷

Peneliti menggunakan metode penelitian observasi yaitu bentuk pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi yang tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti datang ke tempat lokasi penelitian dengan tidak menggunakan instrumen yang telah baku akan tetapi berupa rambu-rambu pengamatan. Melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, dan menurut penelitian terdapat suku terasing atau yang belum dikenal. Adapun yang peneliti amati adalah jadwal program SKS yang telah terpampang di ruang pengelola SKS selama satu tahun, lembar sistem penilaian penyeleksian anak yang masuk program SKS, jadwal akademik, struktur organisasi di MTs Negeri 2 Ponorogo, struktur kepengurusan program Kelas Percepatan dan Bilingual.

Selain melakukan observasi secara langsung yaitu datang ke lokasi penelitian, Peneliti juga mencari data melalui via Online berupa laman internet yang terkait MTs Negeri 2 Ponorogo dan juga pelaksanaan Program SKS oleh Kanwil, Kemenag, dan Dirjen Pendis.

2. Wawancara/ Interview

Dalam buku metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D, Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a*

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2018), 226.

particular topic". Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.³⁹

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*Structured Interview*) dengan menyiapkan instrumen sebagai pedoman wawancara dan alat bantu yaitu *Tape Recorder*, kamera, lembar yang berisi pertanyaan yg diajukan kepada narasumber dan buku catatan. Dengan metode ini peneliti memperoleh data-data terkait pengembangan kurikulum dengan program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo.

3. Dokumentasi

Selain melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait perlu adanya dokumentasi dari kegiatan penelitian. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa tulisan atau catatan dari peneliti pada saat melakukan observasi dan wawancara, gambar-gambar yang terkait dengan kegiatan penelitian, dan dokumen yang berbentuk media cetak seperti Kebijakan Penyelenggaraan Program SKS Tahun 2019.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

³⁸ Ibid., 231.

³⁹ Ibid., 233.

macam (Triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai data jenuh.⁴⁰ Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi atau catatan lapangan, dan dokumentasi dengan data yang bersifat induktif, lalu dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Dari hipotesis yang ada dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak sesuai dengan data yang terkumpul.

Dalam melakukan aktivitas analisis data peneliti menggunakan teori analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.”⁴¹ Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak., kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁴²

Dalam mereduksi data, peneliti dipandu dengan tujuan yang akan dicapainya. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif ialah pada temuan di lokasi penelitian. Mereduksi data perlu suatu proses berpikir kritis dengan memerlukan kecerdasan, keluasan, dan pemahaman mendalam.

⁴⁰ Ibid., 243.

⁴¹ Ibid., 246.

⁴² Ibid., 247.

Peneliti melaksanakan kegiatan mereduksi data dengan melakukan pengerjaan berupa mentahan data-data yang telah diperoleh peneliti di lokasi penelitian menjadi data yang dapat dibaca dan dipahami orang lain. Sekiranya sudah mencukupi peneliti melakukan reduksi data berupa merangkum data yg diperoleh kedalam sub bab yang tersedia guna menjawab rumusan masalah yang ditanyakan dalam penelitian. Jika peneliti merasa ada yang kurang dalam pengerjaannya, peneliti melakukan wawancara tambahan kepada informan yang bersangkutan via online.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴³

Penyajian data yang dilakukan peneliti berupa teks yang bersifat naratif karena peneliti menggali data berupa kegiatan wawancara secara intensif kepada pihak yang berkaitan terkait penyelenggaraan Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo, Sehubungan munculnya pandemi di Indonesia dan pemerintah mengharuskan untuk WFH (*Work From Home*) maka dalam pelaksanaan observasi peneliti melakukan wawancara mendalam kepada

⁴³ Ibid., 249.

informan dan mencari informasi melalui via online dan meminta dokumen terkait penyelenggaraan Program SKS ke madrasah.

3. *Conclusion drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

Temuan peneliti dalam penelitian di MTs Negeri 2 Ponorogo dengan cara melakukan wawancara, observasi dan pengecekan dokumen terkait apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah, kajian teori, dan instrumen penelitian yang di utarakan peneliti sehingga memunculkan kesimpulan yang dapat menjawab tujuan diadakan penelitian ini.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁶

⁴⁴ Ibid., 252.

⁴⁵ Ibid., 267.

⁴⁶ Ibid., 268.

Sehingga dalam penelitiannya bersifat *ideosyneratic* dan *individualistik* dengan peneliti melakukan penelitian perorangan . Peneliti menyampaikan temuan data menurut jalan pikiran sendiri dan bahasa. Proses penelitiannya bersifat personalistik dengan melakukan wawancara kepada yang bersangkutan, pelaksanaan observasi yang bersifat individualistik.

Teknik peneliti dalam pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi dengan pemeriksaan orang- orang yang ikut andil dalam pelaksanaan program SKS.

Menurut Wiliam Wiersman "*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source of multiple data collection procedures.*" Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pengambilan Triangulasi data oleh peneliti untuk mengemukakan penelitiannya diambil dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan menguji kredibilas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh peneliti melalui beberapa sumber. Dalam Triangulasi sumber peneliti melakukan penggabungan data dari Kepala Madrasah selaku pimpinan di Madrasah, Waka Kurikulum sebagai wakil kepala madrasah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program SKS, dan Ketua Program SKS yang diberikan

wewenang oleh kepala madrasah untuk mengelola Program Kelas SKS dengan di bantu anggotanya.

Sumber data yang didapat berupa wawancara dengan pertanyaan yang diajukan kepada informan tersebut dengan pertanyaan wawancara yang sama lalu dianalisis oleh peneliti Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan dilakukannya pengecekan data kepada informan yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, saat peneliti menanyakan terkait program SKS yang berlangsung di MTs Negeri 2 Ponorogo, Waka Kurikulum mengemukakan bahwa “MTs Negeri 2 Ponorogo sudah lolos dalam seleksi sebagai madrasah penyelenggara SKS karena dipandang layak dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program SKS sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis Nomor 6633 Tahun 2019 tentang madrasah penyelenggara SKS”⁴⁷ didukung dengan adanya dokumen yang dimiliki waka kurikulum dan hasil pencarian peneliti Laman internet Dirjen Pendis Kemenag Jawa Timur.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap- tahap dalam penelitian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu : tahap pra di Lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

⁴⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

1. Tahap pra lapangan, Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini yakni meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.⁴⁸
2. Tahap pekerjaan lapangan. Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data.⁴⁹



⁴⁸ J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.

⁴⁹ *Ibid.*, 137.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Profil Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo⁵⁰

Tabel 4.1 Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo

Identitas Sekolah	
1. Nama Sekolah	MTSN 2 PONOROGO
2. Jenjang	SMP
3. NPSN/NSS	20584854/121135020002
4. Alamat Sekolah	
a. Jalan	Ki Ageng Mirah no 79
b. Kelurahan	Japan
c. Kecamatan	Babadan
d. Kabupaten	Ponorogo
e. Provinsi	Jawa Timur
f. Kode Pos	63491
g. Nomor Telepon	(0352) 461227
h. Nomor Fax	-
i. Email	mtsnponorogo@yahoo.co.id
j. Website	www.mtsn2ponorogo.sch.id
5. Posisi Geografis	Lintang : -7.8509894260518
	Bujur: 111.500053381919861

⁵⁰ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 01/D/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

6. Status sekolah	Negeri
7. Status Akreditasi Sekolah	Akreditasi A
8. Waktu Belajar	Sekolah Pagi
9. Tahun Didirikan	1980
10. Tahun Beroperasi	1981
11. Status Tanah	Milik Sendiri

Tabel 4.2 Data pelengkap Madrasah MTs Negeri 2 Ponorog

Data Pelengkap Sekolah	
12.	
a. SK Pendirian Sekolah	Mts/2283/2010
b. Tanggal SK Pendirian	2010-07-01
c. Status Kepemilikan	Kementrian Agama
d. SK Izin Operasional	Mts/2283/2010
e. Tanggal SK Izin Operasional	2010-07-01
f. Akreditasi	A
g. Tanggal SK Akreditasi	27-10-2015

2. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo⁵¹

MTs Negeri 2 Ponorogo merupakan lembaga pendidikan formal yang setingkat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan lazim disebut sebagai SLTP yang bercorak khas Agama Islam yang mana didirikan atau diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Adapun yang mendorong berdirinya MTs Negeri 2 Ponorogo adalah, karena di Ponorogo saat itu hanya satu MTs Negeri Jetis yang terletak di Desa Karanggebang, Kec. Jetis Ponorogo. Disamping hal tersebut terdapat banyaknya bermunculan MTs Swasta pada saat itu, Sehingga pada tahun 1979 Kepala Kantor Departemen Agama Ponorogo membuat usulan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan Surat Keputusan Penegerian dari beberapa MTs Swasta di Kabupaten Ponorogo. Maka pada tahun 1980 turunlah surat Penegerian itu, akan tetapi yang mendapat status penegerian bukan MTs Swasta yang ada di Kab. Ponorogo, melainkan relokasi perpindahan MTs Negeri dari MTs Negeri Genteng Kab, Ngawi.

Akhirnya keluar Surat Keputusan Departemen Agama Republik Indonesia dengan nomor 27 Tahun 1980 Tanggal, 31 Mei 1980 tentang Relokasi Madrasah Negeri, yang mana MTsN Genteng yang berada

⁵¹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 02/D/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

Kabupaten Ngawi di relokasi menjadi MTsN Ponorogo yang berada di Jalan Ki Ageng Mirah No. 79 Ponorogo.

Kemudian Disaat Penegrian Mts Negeri, Oleh Kepala Kantor Depag Ponorogo Ditetapkan Dan Diletakkan Di Kelurahan Setono Kec. Jenangan Kabupaten Ponorogo. Pada Waktu Itu, MTs Negeri Masuk Siang Hari Yang Menempati Gedung Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Setono Dengan Jumlah Siswa Sebanyak 80 Siswa Yang Terdiri Dari 2 Lokal. Selanjutnya Pada Tahun Ajaran 1981/1982 Sehubungan Dengan Situasi Dan Kondisi Pada Saat Itu, Maka Lokasi MTs Negeri Ponorogo Dipindahkan Ke Lingkungan Pelampitan Di Tepi Jalan Raya Jurusan Ngebel. Di Lokasi Baru Inilah Siswa Siswi MTs Negeri Ponorogo Masuk Pagi Seluruhnya. Kemudian Pada Tahun 1982/1983 Jumlah Siswa Kls 1 Sebanyak 104, Kls 2 Sebanyak 96, Sedang Kls 3 Sebanyak 76. Maka Jumlah Seluruhnya 276 Siswa, Sedangkan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Siswa MTs Negeri 2 Ponorogo Pada Saat Itu Menyewa Rumah Bapak Hardjo Tunggul Dan Bpk. Parto Jikan Di Lingkungan Pelampitan Kel. Setono. Kab. Ponorogo.

Adapun nama – nama Kepala yang pernah menjabat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo sebagai berikut :

- a. Drs. H. MUSLIM
- b. Drs. ABDULLAH
- c. KUSTHO, BA

- d. Drs. SUMARDI AL BASYARI
- e. Drs. H. IMAM ASJ'ARI, SH, M.Pd
- f. Drs. H. SUTARTO KARIM
- g. Drs. MOCH. HARIS, M.Pd.I
- h. Drs. TARIB, M.Pd.I

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo⁵²

a. Visi Madrasah

Terwujudnya madrasah berprestasi, unggul dalam bahasa dan iptek serta peduli lingkungan yang berpijak pada iman dan taqwa.

Indikator visi

- 1) Berprestasi dan unggul dalam pembinaan akhlakul karimah
- 2) Berprestasi dan unggul dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan teknologi
- 3) Berprestasi dan unggul dalam inovasi pembelajaran dan inovasi pembelajaran dan manajemen madrasah
- 4) Berprestasi dan unggul dalam peningkatan prestasi akademik dan non akademik

⁵² Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

- 5) Berprestasi dan unggul dalam prestasi olimpiade / ksm dan karya ilmiah remaja (riset) berbasis lingkungan hidup
- 6) Unggul dalam prestasi bahasa dan sastra Indonesia, arab , inggris, dan jawa
- 7) Berprestasi dan unggul dalam profesionalisme tenaga pendidikan dan kependidikan
- 8) Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup MTS Negeri 2 Ponorogo yang hijau, bersih sehat dan indah

b. Misi Madrasah

- 1) Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang amaliah islami serta nilai-nilai budaya bangsa dalam kehidupan nyata
- 2) Mengembangkan kurikulum yang bertaraf internasional untuk mata pelajaran MIPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan mengadopsi atau mengadaptasi kurikulum dari negara maju.
- 3) Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber (*multi resuorces*) dan berbasis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- 4) Melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, kooperatif, komunikatif, dan inspiratif kepada peserta didik
- 5) Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan kultural.
- 6) Mengaplikasikan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

- 7) Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
- 8) Menumbuhkan semangat kompetensi dalam berbagai kompetensi bagi seluruh masyarakat madrasah.
- 9) Mengembangkan potensi dan kreatifitas warga sekolah yang unggul dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 10) Menerapkan manajemen sekolah berbasis madrasah (MSBM) secara profesional dan mengarah kepada manajemen mutu pendidikan yang telah distandarkan dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan lembaga terkait lainnya dalam bentuk MoU.
- 11) Menjalin kemitraan dengan sekolah/madrasah unggul dan perguruan tinggi sebagai pendamping pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk MoU.
- 12) Peduli, berbudaya dan ramah lingkungan, bersikap santun terhadap lingkungan dengan cara mengimplementasikan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tujuan

Mencetak output yang berakhlakul karimah, cerdas, berpengetahuan luas, peduli pada lingkungan, memiliki kecakapan hidup (*life skill*) dan berkompentensi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo⁵³

Struktur organisasi dan unit kerja MTs Negeri 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi MTs Negeri 2 Ponorogo

IAIN
PONOROGO

⁵³Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

5. Sumber Daya Manusia Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo⁵⁴

Tabel 4.3 Sumber Daya Manusia di MTsN 2 Ponorogo

No	Tenaga Pendidikan Dan Kependidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Tenaga Kependidikan	5	Terdiri dari 1 kepala sekolah dan 4 wakil kepala
2.	Tata usaha	13	Terdiri dari lulusan sarjana dan sebagian kecil lulusan SMA sederajat
3.	Guru	57	Terdiri dari lulusan S1, S2 dan S3, tetapi sebagian adalah lulusan S1
4.	Satpam	2	Terdiri dari 2 laki-laki

6. Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo⁵⁵

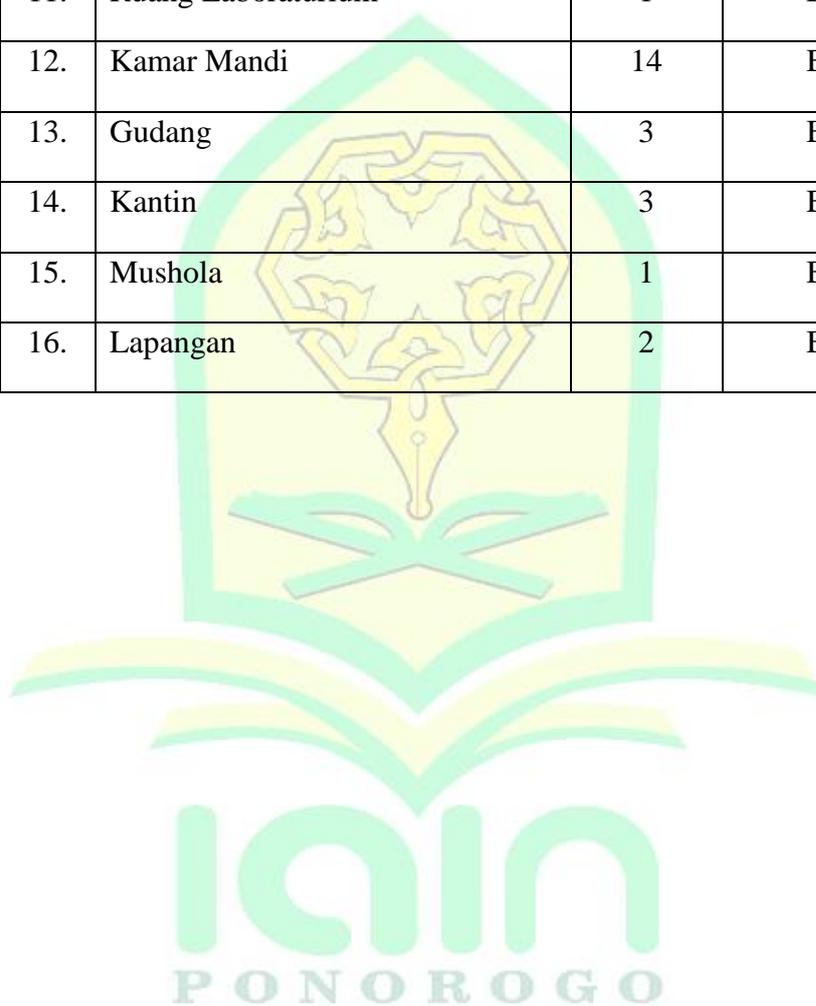
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana di MTsN 2 Ponorogo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala Madrasah	1	Baik
2.	Ruang Wakil Kepala	2	Baik
3.	Ruang Tata Usaha	1	Baik
4.	Ruang Guru	1	Baik
5.	Ruang Kantor Bilingual	1	Baik
6.	Ruang Kantor PDCI	1	Baik

⁵⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 05/D/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

⁵⁵ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 06/D/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
7.	Ruang Belajar	33	Baik
8.	Ruang UKS	1	Baik
9.	Ruang Bimbingan Konseling	1	Baik
10.	Ruang Koperasi	1	Baik
11.	Ruang Laboratorium	1	Baik
12.	Kamar Mandi	14	Baik
13.	Gudang	3	Baik
14.	Kantin	3	Baik
15.	Mushola	1	Baik
16.	Lapangan	2	Baik



B. Deskripsi Data Khusus

Pengembangan kurikulum (*curriculum developer*) merupakan suatu alat dalam meningkatkan kegiatan pendidikan di sekolah/ madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu instrumen yang membantu praktisi pendidikan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pengembangan kurikulum bersifat berkelanjutan dengan memiliki siklus yang terus menerus sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Prosedur pengembangan kurikulum dilakukan bertahap dengan berpedoman pada rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan seksama agar mencapai tujuannya, tahapan-tahapan yang dilaksanakan di MTs Negeri 2 Ponorogo dalam pengembangan kurikulumnya ialah :

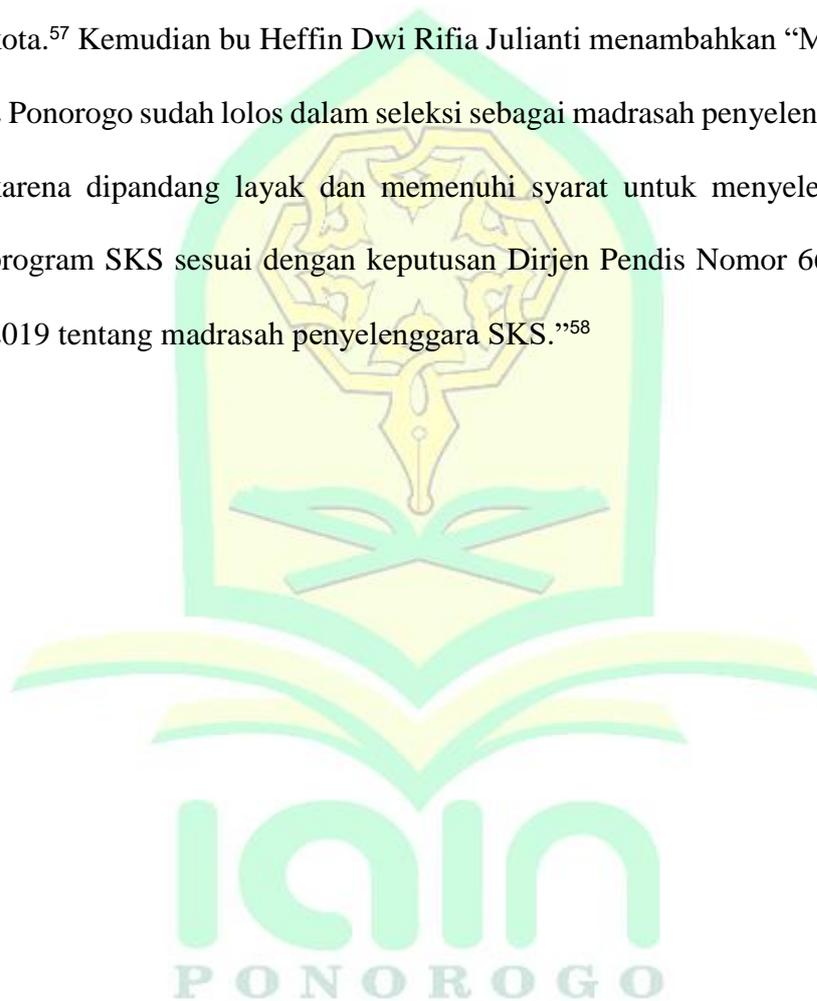
1. Tahap 1 : studi kelayakan dan kebutuhan

Tahap awal dari perencanaan merupakan aktivitas dalam menganalisis suatu kebutuhan dan merumuskan suatu hal atas beberapa pertimbangan-pertimbangan dari hasil studi lapangan dan dokumentasi. MTs Negeri 2 Ponorogo ditunjuk sebagai sekolah yang menerapkan program SKS by School atas beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti yang diungkapkan bapak Tarib selaku kepala madrasah mengungkapkan bahwasanya :

MTs Negeri 2 Ponorogo telah ditunjuk oleh Dirjen Pendis sebagai madrasah percontohan di Jawa Timur, yang telah melakukan program SKS sejak dahulu pada tahun 2009 dengan nama program SKS *by Class* (kelas Akselerasi dan Bilingual), dengan lulusannya dapat melanjutkan pendidikan serta dapat diterima di sekolah lanjutan yang favorit baik dalam kota maupun luar kota. Sehingga

MTs Negeri 2 Ponorogo dipercaya untuk menerapkan program *SKS by School*.⁵⁶

Sedangkan menurut bu Ririen Muranti MTs Negeri 2 Ponorogo merupakan madrasah sebagai *Pillot Project* se-Jawa Timur, telah melakukan program *SKS by Class* dengan lulusan dapat melanjutkan pendidikan dan diterima di sekolah favorit baik dalam kota maupun luar kota.⁵⁷ Kemudian bu Heffin Dwi Rifia Julianti menambahkan “MTs Negeri 2 Ponorogo sudah lolos dalam seleksi sebagai madrasah penyelenggara SKS karena dipandang layak dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program SKS sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis Nomor 6633 Tahun 2019 tentang madrasah penyelenggara SKS.”⁵⁸



⁵⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁵⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁵⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Berikut ini gambar lampiran SK Dirjen Pendis tentang madrasah penyelenggara SKS : ⁵⁹

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6633 TAHUN 2019
TENTANG
MADRASAH PENYELENGGARA SISTEM KREDIT
SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

MADRASAH PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA MADRASAH	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1	MTsN Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur
2	MTsN 3 Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
3	MTsN 1 Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur
4	MTsN 1 Blitar	Kabupaten Blitar	Jawa Timur
5	MTsN 2 Blitar	Kabupaten Blitar	Jawa Timur
6	MTsN 2 Jember	Kabupaten Jember	Jawa Timur
7	MTsN 4 Jombang	Kabupaten Jombang	Jawa Timur
8	MTsN 1 Kediri	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
9	MTsN 2 Kediri	Kabupaten Kediri	Jawa Timur
10	MTsN 1 Lamongan	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur
11	MTsN 1 Lumajang	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur
12	MTsN 1 Magetan	Kabupaten Magetan	Jawa Timur
13	MTsN 6 Malang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
14	MTsN 2 Malang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
15	MTsN 1 Malang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
16	MTsN 3 Malang	Kabupaten Malang	Jawa Timur
17	MTsN 3 Nganjuk	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur
18	MTsN 4 Ngawi	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur
19	MTsN 3 Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur
20	MTsN 1 Paturuan	Kabupaten Paturuan	Jawa Timur
21	MTsN 2 Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur
22	MTsN 2 Probolinggo	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
23	MTs Zainul Hasan 1 Genggong	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur
24	MTsN 2 Kota Kediri	Kota Kediri	Jawa Timur
25	MTsN Kota Madiun	Kota Madiun	Jawa Timur
26	MTsN 2 Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur
27	MTsN 1 Kota Malang	Kota Malang	Jawa Timur
28	MTs Unggulan Amanatul Ummah	Kota Surabaya	Jawa Timur

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,
TTD
KAMARUDDIN AMIN

Gambar 5.1 SK Dirjen Pendis tentang madrasah penyelenggara SKS

Sebelum dikeluarkannya SK terkait pelaksanaan Program SKS *by School*, MTs Negeri 2 Ponorogo sudah lama menerapkan program SKS, dengan nama Program SKS *by Class* dikenal dengan adanya kelas Akselerasi, Bu Ririen Menjelaskan perbedaan SKS *by Class* dan SKS *by School* ialah

proses penyeleksian siswa. Untuk SKS *by Class* dilakukan dengan cara penunjukkan anak secara langsung di awal tahun ajaran melalui seleksi penerimaan siswa baru dan telah dipisahkan kelasnya sedangkan SKS *by School* harus melalui seleksi selama satu semester lalu baru bisa dinyatakan siswa tersebut masuk kelas percepatan dengan IP pada angka 92. Jika Program SKS *by Class* tes IQ menentukan siswa tersebut lolos atau

⁵⁹ Lihat Transkrip Observasi nomor: 05/O/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

tidak sedangkan Program SKS *by School* tes IQ digunakan sebagai penunjang⁶⁰

Bu Heffin dwi menambahkan terkait perbedaan program SKS *by School* dan Program SKS *by Class* ialah

SKS *by Class* atau bisa kita kenal dengan program kelas akselerasi / PDCI ini menuntut mereka untuk lulus lebih awal dengan pengelolaan diserahkan oleh sekolah. Sedangkan untuk program SKS *by School* ini masih sama mereka dituntut lulus lebih awal dengan sistem pengelolaan sudah ada peraturannya yang telah di buat oleh pemerintah. Untuk sekolah dibawah naungan Kemenag pelaksanaan Program SKS diatur dalam UU Dirjen Pendis Nomor 2851 Tahun 2019.⁶¹

Sehubungan dengan perubahan peraturan terkait penyelenggaraan SKS dari Program SKS *by Class* menjadi program SKS *by School* pada tahun 2019 terjadi perubahan dalam penyeleksian peserta didik yang awalnya peserta didik diseleksi pada tahun ajaran awal berubah di saat pergantian semester pada kelas 7. Hal tersebut di ungkapkan oleh siswa MTs Negeri 2 Ponorogo yaitu Inggit menyatakan “ untuk bisa masuk kelas percepatan pada tahun saya dengan tes terlebih dahulu, tesnya meliputi tes tulis mengenai pelajaran, setelah itu tes IQ. Untuk IQ diatas 130 maka bisa masuk kelas percepatan.”⁶², Lalu Hanim Asfi siswa program SKS *by School* menjelaskan proses penerimaan siswa percepatan ialah: “Tahap awal kelas 7 semester 1 saya masuk dalam kelas reguler, di semester 2 terjadi penyeleksian siswa dengan acuan nilai rapot. Jika rata-rata nilai siswa

⁶⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/13-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

minimal dengan poin 92 maka dia layak untuk masuk kelas percepatan. Selanjutnya diadakan tes IQ".⁶³

Dari uraian hasil wawancara diatas tentang analisis kebutuhan dan studi kelayakan dalam penyelenggaraan program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo dapat diketahui bahwa Mts Negeri 2 Ponorogo perlu adanya pengembangan kurikulum untuk mempertahankan program unggulan yaitu program SKS, dimana terjadi pembaharuan dalam penyelenggaraan program SKS, yang awal mulanya program SKS *by Class* berubah menjadi Program SKS *by School*. Pelaksanaan analisis kebutuhan program SKS terhadap peserta didiknya memperhatikan tingkat kecepatan belajar yang relatif sama dalam kelompok setiap mata pelajaran. Jika ditemui peserta didik yang memperoleh IP di semester 1 minimal 92, maka peserta didik tersebut layak untuk masuk kelas percepatan. Dalam lingkup masyarakat diharapkan lulusan program SKS dapat melanjutkan pendidikan dan diterima di sekolah favorit serta terwujudnya tujuan dalam pelaksanaan program SKS ialah terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21 yaitu berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerjasama, berkomunikasi dll. Dalam studi kelayakannya MTs Negeri 2 Ponorogo dinyatakan lolos dalam pelaksanaan program SKS *by School* dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: ditunjuk oleh Dirjen Pendis sebagai *pilot project* atau madrasah percontohan se-Jawa Timur karena telah melaksanakan program SKS sudah lama, lulusan mampu melanjutkan

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/13-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

pendidikan dan diterima di jajaran sekolah favorit baik dalam kota maupun luar kota. MTs Negeri 2 Ponorogo melampirkan data-data kelengkapan terkait madrasah penyelenggara Program SKS by School kepada Dirjen Pendis dan dinyatakan lolos seleksi madrasah penyelenggara program SKS.

2. Tahap 2 : Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum

Dalam tahap ini pengembangan kurikulum menyusun suatu konsep perencanaan, berdasarkan rumusan kemampuan atau indikator-indikator yang telah ditentukan oleh pusat. Adapun hasil wawancara dengan Bu Heffin Dwi Rifia Julianti menjelaskan bahwasanya :

Adapun kriteria yang ditentukan pusat terkait berkas penyeleksian penyelenggaraan program SKS by school diatur dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 2851 Tahun 2019, dengan persyaratan sebagai berikut : Memiliki akreditasi A dari BAN S/M; Memiliki pedoman penyelenggaraan SKS; Memiliki sumber daya manusia yang memadai; Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai; Memiliki perpustakaan dengan referensi yang mencukupi; memiliki sarana literasi; Mendapat izin penyelenggara SKS dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam.⁶⁴

Bu Ririen Muranti menceritakan tahap awal untuk menjadi sekolah yang menerapkan program SKS *by School* ialah

Adanya embrionya mulai dari adanya Kelas Akselerasi pada tahun 2009, lalu dirubah menjadi Kelas PDCI setelah itu adanya penunjukkan oleh Dirjen Pendis sebagai madrasah percontohan atau *Pillot Project*, serta *output* dari madrasah ini memuaskan sehingga sekolah ini dinyatakan lolos dalam seleksi sekolah yang menerapkan program SKS *by School*.⁶⁵

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁶⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Hal tersebut senada dengan penjelasan bapak Tarib sebagaimana hasil wawancara berikut :

Adanya Kelas Akselerasi atau dikenal dengan program SKS *by Class* tahun 2009, kemudian setelah itu adanya penunjukkan oleh Dirjen Pendis kepada MTs Negeri 2 Ponorogo sebagai madrasah percontohan, serta yang terakhir madrasah ini dinilai begitu memuaskan sehingga sekolah ini dinyatakan lolos dalam seleksi sebagai sekolah yang menerapkan program SKS *by School*.⁶⁶

Yang terlibat dalam penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum program SKS sebagaimana hasil wawancara dengan bu Ririen Muranti “ Terdapat 18 orang terlibat dalam perencanaan program SKS meliputi : waka kurikulum, kepala madrasah, pengelola SKS, komite, kepala TU”⁶⁷ Kemudian diperkuat oleh Bapak Tarib dan Bu Hefin terkait siapa saja yang terlibat dalam penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum.

Terdapat tahapan dalam perencanaan program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo, bu heffin menjelaskan bahwa tahapan perencanaan program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo sebagai berikut :

Pertama-tama madrasah ini sebagai penyelenggara SKS kepada Kanwil Kemenag Provinsi dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait SKS, selanjutnya Kanwil Kemenag melakukan verifikasi kelayakan madrasah, sekiranya madrasah sudah layak dalam pelaksanaan program SKS maka turun surat izin penyelenggaraan SKS dari Dirjen Pendis. Selanjutnya, kepala madrasah menunjuk bawahan untuk mengelola pelayanan program SKS khususnya untuk kelas percepatan dengan sistem pembelajaran, guru yang mengajar, dll. Tak lupa mengirim

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

perwakilan madrasah untuk mengikuti workshop dan penataran terkait pelaksanaan program SKS by school.⁶⁸

Selanjutnya, Pak Tarib menambahi

Tahapan-tahapan madrasah dalam perencanaan program SKS mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh Dirjen Pendis tentang pelaksanaan program SKS dalam peraturan juklak dan juknis pelaksanaan program SKS tahun 2019, termasuk dalam hal pengembangan kurikulumnya. Tetapi jika suatu saat pemerintah dan dinas terkait melakukan perubahan kebijakan maka madrasah kita juga melakukan pembaharuan tahapan sesuai keputusan pemerintah.⁶⁹

Bu Ririen Muranti memperkuat pernyataan dari Pak Tarib terkait tahapan perencanaan program SKS ialah “ Kita mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh Dirjen Pendis tentang pelaksanaan program SKS *by School* oleh Dirjen Pendis Nomor 2851 Tahun 2019. Jika, pemerintah dinas yang terkait melakukan perubahan kebijakan maka kita juga melakukan pembenahan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan.”⁷⁰

Untuk menunjang ketercapaian pelaksanaan program SKS Madrasah juga mengikuti workshop terkait penyelenggaraan SKS *by school*, Pak Tarib mengutarakan “ Untuk sosialisasinya sangat banyak dan beragam karena program SKS *by School* ini ada di tahun lalu. Sosialisasi terkait bagaimana pelaksanaannya, sistem pembelajarannya, penilaian

⁶⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁷⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

siswa, monitoring dan evaluasi, diadakanya workshop kepada guru-guru madrasah program SKS se-Jatim dll. ”⁷¹

Bu Ririen Muranti menambahkan sosialisasi Penyelenggaraan SKS pernah “diadakannya workshop MAN 2 Ponorogo pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 bertema “ Penguatan SKS *by School* dan pembuatan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). Dengan narasumbernya ialah Dr. Ahmad Hidayatullah, M. Pd selaku kasubdit kurikulum dan evaluasi, direktorat KSKK madrasah kemenag RI. ”⁷²

Bu Heffin juga menambahkan bahwasanya “terkait pelaksanaan sosialisasi program SKS *by School* ini dilakukan oleh Dirjen Pendis, launching program SKS ini dilaksanakan pada tahun 2018 di Pasuruan”⁷³

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara tentang perencanaan kurikulum bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam perencanaanya mengikuti kebijakan dari Dirjen Pendis yang diatur dalam SK Dirjen Pendis Nomor 2851 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan SKS. Melakukam persiapan-persiapan dalam pelaksanaan program SKS terbaru terkhusus dalam pembelajaran kelas percepatan oleh tim pengembang kurikulum program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo meliputi : Waka kurikulum, kepala sekolah, pengelola SKS, komite dan kepala TU. Agar

⁷¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁷² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁷³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

perencanaan program SKS berjalan dengan baik tak lupa kepala sekolah mengirim perwakilan sekolah atau madrasah untuk melaksanakan workshop dan penataran terkait pelaksanaan program SKS di wilayah Jawa Timur.

3. Tahap 3 : Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum dalam rencana operasional kurikulum, mencakup : penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar dsb. Dalam pelaksanaan ini terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh seperti : mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis masalah yang menjurus pada tujuan-tujuan madrasah, mengembangkan suatu pemecahan dari masalah, pelaksanaan dalam bentuk ujicoba di lapangan dan yang terakhir yaitu menilai program.

Pak Tarib Menjelaskan bahwasanya :

Untuk mempersiapkan perencanaan kurikulum antara lain dengan perlakuan pembelajarannya sedikit berbeda dengan kelas yang lain, Kemudian dalam pembuatan RPP, RKT, RKAM kita melakukan pembuatan UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) sehingga dapat menjadi suatu inovasi pembelajaran untuk jenjang madrasah yang menyelenggarakan program SKS. Selanjutnya harus ada penyesuaian kalender akademik dalam penyusunan dan pengelolaan program untuk kelas percepatan, yang bertujuan supaya semua kegiatan dapat sesuai dan supaya kegiatan dari program SKS dapat terlaksana.⁷⁴

Berikut Ini gambar Kalender Akademik Tahun Ajaran 2019/2020⁷⁵

⁷⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/20-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁷⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Berikut ini gambar struktur kurikulum MTsN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020⁷⁹

Lampiran 1: SK Kepala MTs Negeri 2 Ponorogo
Nomor : 44 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019

**STRUKTUR KURIKULUM
MTsN 2 PONOROGO
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

NO.	Mata Pelajaran	TGT	PDCI			BILINGUAL			REGULER			KEY
			VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	
Jumlah Rombel		34	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
Kelompok A												
1	Pendidikan Agama Islam											
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	b. Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	d. SKI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	PPKn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Bahasa Arab	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Matematika	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	IPA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	IPS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kelompok B												
1	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Bimbingan dan Konseling	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	PJOK	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Prakarya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Bahasa Jawa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah (Kurikulum Nasional)	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Kelompok C												
1	BTQ/ Metode Umi			1	1	1	1		1	1	1	
2	Muhadatsah			2	1							
3	Conversation				1	2						
4	Imlak									1	2	
5	Dictation									2	1	
6	Khitobah								2	2		
7	Tamrinat											
8	Comption											
9	TIK			1	1				1	1		
	Jumlah			2	2	4	4		4	4	4	
Tambahan Jam Peminatan (Kelas 7)												
1	Bahasa Indonesia			7C	7C							
2	Matematika			7A	7A							
3	IPA			7B	7B							
4	Bahasa Inggris			7E	7E							
5	PAI			7F	7F							
6	IPG			7D	7D							
	Jumlah			2	2							
Tambahan Jam UN (Kelas 9)												
1	Bahasa Indonesia			1	1							1
2	Matematika			1	1							1
3	IPA			1	1							1
4	Bahasa Inggris			1	1							1
	Jumlah			4	4							4
	Total			52	52	52	52	52	52	52	52	52

Kepala Madrasah,
Tarib

Gambar 5.4 Struktur kurikulum MTs Negeri 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020

Dalam melaksanakan kurikulum K13 dengan program SKS yang awalnya *by Class* lalu dirubah menjadi program SKS *by School* terjadi

⁷⁹ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 06/O/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

perubahan dalam sistem pembelajarannya di madrasah, bu Ririen Muranti menjelaskan

Dahulu kelas akselerasi kegiatan pembelajaran dalam kelas per mapel 30 menit karena materi dipadatkan dan waktu pembelajaran ditentukan dari pihak sekolah sendiri. Sekarang tidak, anak percepatan jamnya sama dengan kelas bilingual dan reguler, per mapel 40 menit datang dan pulang bersama. Waktu dari kegiatan pembelajaran sudah diatur melalui peraturan dirjen pendis nomor 2851 tahun 2019. Sebelum pemerintah mengeluarkan perintah lockdown sehabis UAMBN dilakukan PAS untuk kelas percepatan dan PTS untuk kelas bilingual dan reguler. Dahulu anak PDCI / akselerasi madrasah membuat penanggalan tersendiri. Maka, untuk kelas percepatan dalam 1 semester dilaksanakan selama 3 bulan.⁸⁰

Pak Tarib memperkuat pernyataan dari bu Ririen Muranti terkait perubahan pembelajaran dari Program SKS *by Class* menjadi Program SKS *by School* ialah

Memang terjadi perubahan saat dilakukan program ini di madrasah, contohnya seperti dulunya Kelas Akselerasi terdapat 30 menit untuk setiap mapelnya, karena materi dipadatkan dan waktu pembelajaran juga ditentukan dari pihak sekolah sendiri. Sekarang tidak seperti itu lagi, untuk siswa percepatan jamnya sama dengan kelas bilingual dan reguler, untuk setiap mapelnya 40 menit sehingga datang dan pulang bersama. Dan waktu dari kegiatan pembelajaran juga sudah diatur melalui peraturan dirjen pendis nomor 2851 tahun 2019. Yaitu lebih tepatnya sebelum pemerintah mengeluarkan perintah lockdown sehabis UAMBN dilakukan PAS untuk kelas percepatan dan PTS untuk kelas bilingual dan reguler. Sedangkan dulu siswa program akselerasi madrasah membuat dan mempunyai hitungan penanggalan tersendiri. Maka, untuk kelas percepatan itu sendiri 1 semester dapat dilaksanakan selama 3 bulan.⁸¹

⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Terkait hasil pemaparan dari wawancara kepada informan tentang pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum diperoleh hasil bahwa dalam perancangannya dalam pembelajaran, pengembangan silabus mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, RPP disusun dan dikembangkan menjadi UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM merupakan suatu inovasi pembelajaran dalam program SKS *by School*. Media pembelajaran menggunakan UKBM dengan buku teks pelajaran yang memuat KI dan KD setiap mata pelajaran. Dalam pelaksanaan dalam kelas waktu belajar peserta didik percepatan dengan kelas bilingual dan reguler sama yang membedakan ialah beban belajar untuk kelas percepatan dipadatkan. Pelayanan untuk kelas unggulan berbeda dengan kelas reguler, adanya kegiatan dari pengelola program SKS diluar jam pelajaran akademik untuk melatih skill peserta didik. Disediakan klinik belajar untuk peserta didik dimana guru diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai upaya menambah atau mengulang penjelasan materi kepada peserta didik di luar jam pelajaran.

4. Tahap 4 : Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan

Tujuan dalam uji coba kurikulum ialah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan dan keberhasilan dari kurikulum yang telah direncanakan. Dalam kegiatan uji coba ini pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sempit. Dengan memunculkan beberapa hasil guna di evaluasi.

Pak Tarib menyatakan bahwasanya

Madrasah tidak melaksanakan uji coba dalam penyelenggaraan program SKS *by School* ini, saat madrasah dinyatakan lolos dalam seleksi madrasah penyelenggaraan SKS *by School* oleh Dirjen Pendis segera

madrasah mengeluarkan SK terkait penyelenggaraan program SKS by school, mempelajari terkait penyelenggaraan Program SKS *by school* dan mengirimkan perwakilan madrasah untuk mengikuti workshop dan penataran terkait Program SKS *by School*.⁸²

Senada dengan pendapat Bu Ririen Muranti sebagaimana hasil wawancara berikut : “Madrasah ini tidak melaksanakan uji coba pelaksanaan kurikulum program SKS karena madrasah sudah di percaya pusat/ kanwil sebagai *Pillot Project* selain itu madrasah sudah menerapkan program SKS sudah lama mulai tahun 2019, atau bisa kita kenal adanya program unggulan yaitu Kelas Akselerasi”⁸³

Bu Heffin berpendapat sama bahwasanya :

Madrasah ini tidak menerapkan uji coba dalam penyelenggaraan kurikulum program SKS *by school* karena madrasah sudah menerapkan program SKS sudah lama dengan nama program SKS *by Class* dengan adanya Kelas Akselerasi/ PDCI. Dalam perencanaan manajemen kurikulum program SKS *by School* mengikuti kebijakan dari pusat, sedangkan program SKS *by Class* dahulu dipasrahkan kepada madrasah.⁸⁴

Dari pemaparan tentang pelaksanaan uji coba dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa MTs Negeri 2 Ponorogo tidak melaksanakan kegiatan uji coba secara langsung atau dengan menggunakan peserta didik sebagai kelinci percobaan dalam pelaksanaan program SKS. MTs Negeri 2 Ponorogo sudah menerapkan program SKS sudah lama sehingga Dirjen Pendis wilayah Jawa Timur telah mempercayai madrasah untuk

⁸² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

menerapkan Program SKS *by School* dan di tunjuk sebagai salah satu madrasah percontohan di wilayah Jawa Timur.

5. Tahap 5 : Pelaksanaan kurikulum

Pada tahap ini pengembangan kurikulum melakukan sebuah pelaksanaan kurikulum yang sudah di rencanakan dalam lingkup lebih luas, pelaksanaan kurikulum yang menyeluruh. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas . Pada tingkat sekolah kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum dengan dibantu para waka. Pak Tarib mengutarakan bahwasanya

Pada awal semester menyusun berbagai perencanaan layanan SKS Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM), Kalender Akademik dan perencanaan lainnya, Menerbitkan SK pengelola SKS dan penugasan guru sebagai pembimbing Akademik (PA), Menyusun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian penyelenggara SKS, membantu pengembangan profesional guru dalam meyusun dan melaksanakan layanan utuh unit-unit pembelajaran atau UKBM-UKBM, mengelola sarana dan prasarana pendukung layanan SKS⁸⁵ .

⁸⁵Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Berikut Ini gambar jadwal mengajar tahun ajaran 2019/2020⁸⁶

TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020												Nomor : 44 Tahun 2019 Tanggal : 31 Desember 2019			
SENIN PRESTASI: 01 Pety Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 02 Video, 01 P2 PRESTASI: 03 Aduh (Aduh, 01 P2)						SELASA PRESTASI: 04 Layar Cetak dan Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 05 Mekanisme, 01 P2 PRESTASI: 06 Mekanisme dan Mekanisme, 01 P2									
RABU PRESTASI: 07 Cetak (Layar, 01 P2) PRESTASI: 08 Tampilan, 01 P2 PRESTASI: 09 Mekanisme (Layar, 01 P2)						KAMIS PRESTASI: 10 Sifat, 01 P2 PRESTASI: 11 Sifat dan Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 12 Sifat dan Interaktif, 01 P2									
JUMAT PRESTASI: 13 Layar dan Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 14 Layar dan Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 15 Layar dan Interaktif, 01 P2						SABTU PRESTASI: 16 Sifat dan Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 17 Sifat dan Interaktif, 01 P2 PRESTASI: 18 Sifat dan Interaktif, 01 P2									
Berlangsung mulai tanggal 02 Januari 2020															

Gambar 5.5 Jadwal mengajar tahun 2019/2020

Dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk layanan program SKS Pak Tarib mengemukakan :

Persiapan pertama madrasah setelah kelas percepatan program SKS terbentuk yaitu mengumpulkan wali murid pada awal tahun dan pada saat pertemuan tersebut terdapat komite, dan beberapa orang yang menjadi bagian pelaku program ini. Di dalam acara tersebut diadakan dialog terbuka yang membicarakan beberapa materi yang berkaitan Program madrasah ini, diantaranya membahas tentang masalah pembiayaan, jadi wali murid dan hadirin mengetahui bahwa setiap anak membayar sekian untuk penunjang pembelajaran kelas percepatan mau atau tidak. Dan untuk sarana dan prasarana di setiap kelas seperti kamera cctv, lcd proyektor, AC, TV, papan tulis kaca, pencahayaan cukup, sudah tercukupi.⁸⁷

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bu Ririen Muranti terkait pengadaan sarana dan prasarana untuk kelas percepatan ialah

⁸⁶ Lihat Transkrip Observasi Nomor: 04/O/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁸⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Begitu terbentuk kelas percepatan program SKS, diawal tahun wali murid dikumpulkan , terdapat komite, *Saber Cyber* yang terdapat payung hukumnya agar tidak dikatakan dengan kegiatan pungli. Lalu dilakukan kegiatan dialog Kegiatan dilakukan terbuka kemudian mengajukan program semacam ini dengan pembiayaan sekian, lalu di pukul rata sekian, setiap anak membayar sekian untuk penunjang pembelajaran kelas percepatan mau atau tidak. Untuk sarana dan prasarana sudah memenuhi karena di tiap-tiap kelas terdapat standarnya seperti kamera CCTV, LCD proyektor, AC, TV , papan tulis kaca, pencahayaan cukup, kelas didesain nyaman dan aman agar siswa betah di kelas untuk belajar. Dengan sistem penataan bangku di pasrahkan kepada siswa agar anak nyaman.⁸⁸

Bu Heffin selaku waka kurikulum yang memiliki tugas untuk membantu kepala madrasah dalam membantu pelaksanaan kurikulum memiliki tugas ialah “Saya selaku waka kurikulum membantu program kepala sekolah dalam mencapai tujuan madrasah terkhusus dalam pelaksanaan kurikulum program *SKS by School* ini.”⁸⁹

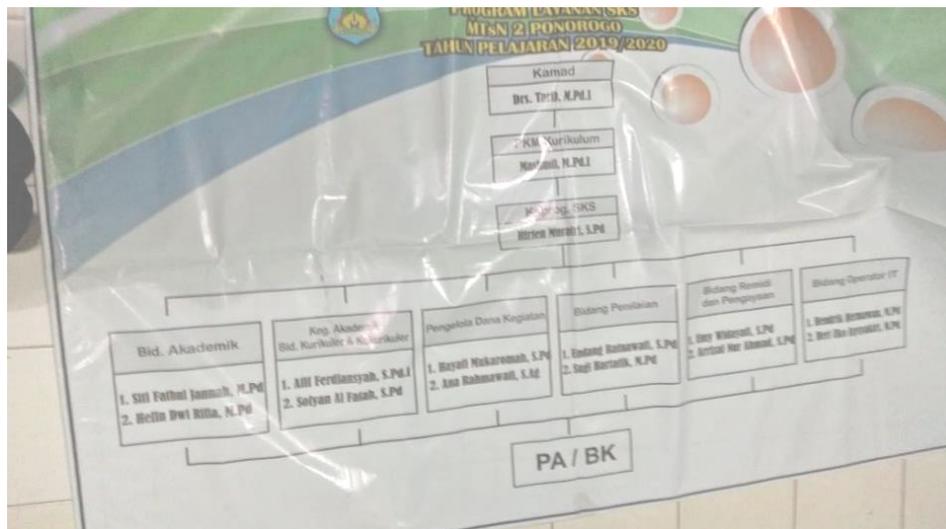
Seperti yang dijabarkan oleh kepala madrasah dalam pengelolaan pelayanan program SKS memiliki pengelola tersendiri, Bu Ririen Muranti Selaku ketua Program Layanan SKS menjelaskan “Membantu melayani untuk menyiapkan administrasi penyelenggaraan SKS, Melaksanakan operasional Aplikasi Raport Digital (ARD) SKS, mengadakan program untuk peserta didik dalam kelas percepatan dan bilingual.”⁹⁰ Dalam pengelolaan memiliki struktur kepengurusan. Berikut gambar dari struktur kepengurusan program layanan SKS⁹¹

⁸⁸Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/09-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁸⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹¹Lihat Transkrip Observasi Nomor: 03/O/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.



Gambar 5.6 Struktur kepengurusan program layanan SKS

Pada pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang berperan besar adalah guru yang meliputi tiga jenis kegiatan administrasi yaitu : kegiatan dalam bidang belajar mengajar, pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan pembimbing dalam kegiatan bimbingan belajar.

Bu Heffin dan Pak Mashudi selaku guru menjelaskan terkait tupoksi guru dalam pelaksanaan kurikulum ialah

Mengembangkan silabus, menyusun RPP, mengembangkan kurikulum mata pelajaran dalam bentuk unit-unit utuh pembelajaran atau UKBM, melaksanakan pembelajaran dengan program SKS, memberikan layanan pembelajaran individu bagi anak-anak, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam bentuk penilaian.⁹²

⁹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Pak Mashudi diberikan tanggung jawab oleh kepala madrasah sebagai pendamping akademik di kelas percepatan, Pendamping Akademik memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :⁹³

- a. “Membimbing sejumlah peserta didik dalam satu rombongan pembimbingan atau kepenasehatan dalam aktivitas belajar siswa sejak awal sampai akhir pendidikan atau dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya pak Mashudi menjadi pendamping akademik “masih berjalan satu semester tahun pelajaran ini⁹⁴ dengan membimbing 1 rombel berisi 26 anak.”
- b. Membimbing perkembangan prestasi akademik peserta didik hingga akhir masa studi; Membimbing peserta didik pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pemilihan peminatan, dan pembagian rapor, dan/atau melaksanakan konsultasi akademik. Dalam membimbing siswa untuk pengisian KRS ialah “secara klasikal pada awal kegiatan KBM, sebelum KBM berlangsung”⁹⁵. Bu Ririen menyatakan bahwasanya “ Untuk KRS dengan sistem semi paket. Siswa belum diberikan wewenang untuk memilih sendiri mata pelajaran yang akan mereka jalani dan tiap semesternya pendamping Akademik (PA) bertanggung jawab dalam membimbing siswa melaksanakan

⁹³Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

KRSan.”⁹⁶. Selanjutnya untuk pemilihan peminatan pak mashudi menyatakan bahwasanya “Kami meminta masukan data dari berbagai pihak, misalkan guru mapel selama proses KBM semester 1. Juga dari BK juga analisis hasil tes IQ. Kemudian secara klinis anak-anak di arahkan sesuai dengan data dan mensinkronkan dengan pilihan keinginannya.”⁹⁷. Lalu dalam bimbingan rapot Pak Mashudi menjelaskan bahwasanya “Raport kami bagikan melalui orang tua wali. Kemudian juga pada saat bersamaan kami sampikan data umum capaian belajar anak-anak. Selanjutnya setelah itu ada sesi konsultasi dari orangtua wali dan juga bersama BK. Terkait perkembangan belajar anak-anak.”⁹⁸. Bapak tarib menambahkan “Kemudian untuk sistem KHS yaitu dengan menggunakan aplikasi raport digital dengan sistem online saat ini”⁹⁹

- c. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendalaman minat peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya.
- d. Membuat laporan hasil penilaian setiap semester. Selanjutnya Pak mashudi menjelaskan terkait Laporan Hasil Penilaian ialah “Laporan

⁹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

⁹⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

hasil penilaian dibuat secara online dan offline. Melalui aplikasi pemerintah yakni ARD”¹⁰⁰

- e. Memberikan pertimbangan dan menetapkan peserta didik yang dapat mengambil UKBM setiap semester.
- f. Menetapkan mata pelajaran yang harus diikuti dalam program remedi atau pengayaan dari setiap peserta didik yang menjadi bimbingannya. Pak Mashudi menjelaskan bahwasanya “Anak-anak kita damping dalam remedial teaching. Bersama guru mapel yang di butuhkan. Sebagai PA senantiasa komunikatif aktif dengan semua guru mapel.”¹⁰¹
- g. Memantau dan melakukan analisis terhadap data bakat, minat, dan prestasi yang diperoleh dari BK, serta memberikan rekomendasi konstruktif selama mengikuti pendidikan di satuan pendidikan agar setiap peserta didik berkembang potensi akademiknya secara maksimal.
- h. Melakukan pendampingan secara intensif sehingga peserta didik dapat menyelesaikan masa studi di MTs tepat waktu dengan hasil yang optimal.
- i. Mengelola hasil penilaian akhlak mulia dan kepribadian berdasarkan hasil penilaian dari guru mata pelajar Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan dan masukan dari guru mata pelajaran lainnya.

¹⁰⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁰¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

- j. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orangtua, BK, dan guru mata pelajaran lainnya untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik. Cara Pak Mashudi melaksanakan hal tersebut dengan “Melalui forum resmi maupun non-resmi. Minimal satu semester 2x”¹⁰²
- k. Memberikan layanan konsultasi akademik sesuai kebutuhan dalam tiap semester. Dalam memberikan layanan konsultasi akademik Pak Mashudi menjelaskan yakni “ Secara klasikal dengan memanfaatkan waktu-waktu yang efektif. Juga melalui daring dengan medsos yang kita buat bersama.”¹⁰³

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada siswa kelas terjadi perubahan di kelas 9 dan kelas 8 karena MTs Negeri 2 Ponorogo masih menerapkan Program SKS by Class dan Program SKS by school. Inggit Nandia menjelaskan

Untuk KBM sendiri sedikit berbeda dari kelas yang lain karena kita dalam satu tahun pertama harus menyelesaikan materi kelas 7 dan 8 smt 1, dan satu tahun terakhir menyelesaikan kls 8 smt 2 dan kelas 9 . Dalam 1x pertemuan kurang lebih 2 jam pelajaran atau 80 Menit. Khusus untuk mapel UN biasanya sampai 3 jam pelajaran. KKM yang harus dicapai untuk kelas percepatan ialah 92.¹⁰⁴

sedangkan Hanim Asfi menjelaskan proses pembelajaran di kelas percepatan yakni “Seperti dengan kelas yang lain hanya waktu belajarnya

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁰³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁰⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/13-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

di percepatan. Untuk 1 kali pertemuan harus menyelesaikan 1 BAB . dengan KKM 92”.¹⁰⁵

Dari uraian hasil wawancara diatas tentang pelaksanaan kurikulum, terdapat 2 tingkatan dalam pelaksanaan kurikulum yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum dengan dibantu oleh para waka dalam merencanakan Rencana Kerja Tahunan, Rencana kerja dan Anggaran Madrasah, Kalender Akademik, menerbitkan SK pengelola Program SKS, Penugasan guru sebagai pembimbing akademik tiap-tiap kelas, Menyusun UKBM, Mengelola Sarpras dll. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, dalam kelas percepatan perlu adanya bimbingan ekstra kepada peserta didik adanya pembimbing akademik dengan tugas yaitu mampu memahami kemampuan minat, bakat peserta didik dengan adanya bimbingan secara langsung dan tidak langsung. Pembimbing akademik senantiasa aktif dalam berkomunikasi kepada peserta didiknya.

6. Tahap 6 : Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum

Pada tahap ini pengembang kurikulum melakukan pemantauan kurikulum yang telah dilaksanakan serta penilaian yang nantinya memunculkan sebuah masukan-masukan sesuai dengan desain kurikulum yang telah disepakati dan hasil atau dampak dari pelaksanaan kurikulum.

Dalam pelaksanaan pemantuan terkait program SKS di madrasah ialah pengawas yang tunjuk oleh Dirjen pendis untuk melakukan

¹⁰⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 07/W/13-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

pemantauan terjadwal dan sidak di madrasah. Bu Ririen menjelaskan “ Yang dievaluasi semua dan yang mengevaluasi Program SKS di madrasah ini ialah kanwil dan Dirjen Pendis mulai dari program, pelaksanaan, dan administrasi.”¹⁰⁶

Dalam pelaksanaan pemantauan kepala madrasah juga ikut andil dalam penyelenggaraannya seperti yang di ungkapkan Pak Tarib “ Kepala Madrasah pasti mengawasi pelaksanaan program SKS, karena seorang kepala madrasah sebagai bagian terdepan dalam setiap unsur di madrasah. Sehingga pasti juga memiliki andil serta bagian khusus dalam pengawasan pelaksanaan program ini.”¹⁰⁷

Dalam pelaksanaan penilaian/ evaluasinya Bu Heffin menyatakan bahwa “Evaluasi yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan program SKS *by School* ini meliputi efektivitas prosedur pelaksanaan SKS *by School*, tenaga pendidik (guru), modul pembelajaran, dan teknik-teknik dalam mengajar. Hal tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk memperbaiki performance pada masa mendatang”¹⁰⁸ Bu Heffin juga menambahkan terdapat “kegiatan pembinaan dan evaluasi untuk program SKS Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Se-Jawa Timur dilaksanakan di MAN 2 Probolinggo.”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁰⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁰⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹⁰⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

Selain pelaksanaan evaluasi dari dinas terkait madrasah juga melakukan kegiatan evaluasi kepada peserta didik. Menurut penjelasan dari Bu Ririren Muranti evaluasi mengenai pelaksanaan kurikulum ialah “Dilihat dari hasil siswa, mulai dari lulusan dan nilai rapot.”¹¹⁰ Bu Heffin menambahkan “Penilaian dilakukan selama pelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai (penilaian hasil/produk). Ketentuan penilaian madrasah ini berpedoman pada permendikbud no 53 tahun 2015 dan nomor 23 tahun 2016.”¹¹¹ Pak Mashudi menambahi penilaian kepada peserta didik berupa nilai rapot setiap semesternya dengan “ Laporan hasil penilaian dibuat secara online dan offline melalui aplikasi pemerintah yakni ARD”¹¹²

Dari pemaparan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa dalam tahap pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum ini untuk kegiatan pematauannya dilakukan secara terjadwal dan tidak oleh pemangku kepentingan. Selain dilakukan pemantaun secara langsung, juga dilakukan pemantauan dengan tidak langsung yaitu madrasah membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Untuk kegiatan evaluasi meliputi efektivitas prosedur pelaksanaan program SKS, tenaga pendidik, modul pembelajaran, teknik-teknik mengajar. Proses evaluasi juga dilaksanakan kepada peserta didik yaitu penilaian selama kegiatan

¹¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹¹¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹¹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

pembelajaran berlangsung dan pembelajaran usai dengan hasil berupa nilai dalam raport yang di keluarkan setiap semesternya.

7. Tahap 7 : Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian

Pada tahap ini pengembang kurikulum melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kurikulum jika ditemui hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau harapan madrasah.

Pak Tarib menyatakan tindak lanjut dari adanya pemantauan dan penilaian sebagai berikut :

Setelah melakukan evaluasi secara bertahap maka madrasah akan terus meningkatkan apa yang masih menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program SKS ini. Kemudian setelah itu pada setiap tahunnya dilakukan perbaikan. Akan ditampilkan selalu feedback dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan , mulai dari masukkan di bagian kanwil, komite maupun wali murid.¹¹³

Pak Tarib menyatakan “Hambatan yang dialami madrasah dalam pelaksanaan program SKS *by School* ini cukup beragam, mulai dari siswa, guru dan pengelola. Akan tetapi dalam setiap bulannya diadakan rapat pembahasan mengenai program SKS *by School* guna pemaparan masalah yg dihadapi dan mendiskusikan solusinya.”¹¹⁴

Salah satu hambatan yang diutarakan inggit bahwasanya

Kadang suka kurang mampu membagi waktu, karena tugas sudah pasti banyak dan pulang sore, ditambah jika ada PR atau tugas kelompok yang mengharuskan dikumpulkan dalam waktu dekat. Sebenarnya kami berharap dan meminta kepada pihak madrasah untuk mengurangi tugas yang diberikan, Dalam

¹¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

¹¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/12-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

pelaksanaan memberikan solusi dari permasalahan saya masih belum maksimal.¹¹⁵

Bu Ririen dan Bu Heffin berpendapat sama terkait hambatan yang masih menjadi titik fokus dalam pengelolaan Program SKS ialah

Membuat anak tidak mudah jenuh, pada suatu saat tertentu anak mengalami titik jenuh, sehingga guru harus pandai mengelola kegiatan belajar mengajar. Seluruh Guru tidak boleh memberikan PR . agar anak mendapat istirahat yang cukup dan dapat bersosialisasi dengan keluarga saat mereka berada di rumah. Sehingga pembelajaran haruslah dituntaskan di sekolah walaupun terdapat guru memberikan tugas jangan sampai membebani / menyulitkan siswa sampai dibawa pulang dan tugas tersebut harus selesai besok dan dikumpulkan. Karena anak Mtsn termasuk dalam fase peralihan... apalagi untuk percepatan jika pada saat sd masuk di umur 6 tahun sehingga umur saat masuk mtsn masih umur anak-anak, padahal dalam fase anak-anak mereka masih dalam keadaan bermain, dan saat di Mtsn terkhusus anak percepatan dituntut untuk bertanggungjawab. Sehingga dari sekolah terdapat penegasan untuk guru yang mengajar bertanya kepada peserta didik yang diajarnya maksimal 2-3 PR dalam sehari untuk memberikan waktu murid dalam mengembangkan sosialnya, bakat diluar bidang akademik (pembelajaran di sekolah), perlu adanya pengembangan karakter sesuai minat dan bakat yang dimiliki.¹¹⁶

Dari pemaparan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan mengenai tahap perbaikan dan penyesuaian saat ini terfokus dalam pelaksanaan program SKS by School dengan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan SKS saat ini. Setiap tahunnya dilakukan feedback dalam penyelenggaraan program SKS. Permasalahan

¹¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 06/W/13-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian

¹¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/10-III/2020 dalam Lampiran Hasil Penelitian.

dalam pelaksanaan program SKS sangatlah beragam mulai dari kendala yang dihadapi peserta didik, guru, dan pengelola.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Tahapan pengembangan kurikulum madrasah berbasis SKS

Desentralisasi pendidikan adalah pemberian wewenang kepada suatu lembaga yang memiliki kedudukan lebih rendah untuk pelaksanaan segala tugas pendidikan. Secara struktural Pemerintah pusat menyerahkan segala wewenang pengurusan pendidikan kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten. Desentralisasi pendidikan memberikan suasana baru dalam pengelolaan dan pengembangan kurikulum di madrasah. Terlebih lagi dengan adanya sekolah program SKS merupakan suatu layanan penyelenggaraan pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan kecepatan belajarnya.

Kurikulum memegang peranan penting dalam pelaksanaan proses pendidikan tak terkecuali dalam madrasah. Nilai sosial, tuntutan zaman, dan kebutuhan masyarakat yang cenderung mengalami perubahan menuntut adanya Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum di MTs Negeri 2 Ponorogo awal mulanya adanya program SKS *by Class*, berubah menjadi Program SKS *by School* dikarenakan dicabutnya SK Dirjen Pendis Nomor 3364 Tahun 2015 tentang program SKS *by Class*, lalu dikeluarkannya SK Dirjen Pendis Nomor 2851 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan SKS *by School*. Dalam proses pengembangan kurikulum dilakukan dengan hati-hati,

dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan seksama melalui beberapa tahap mengacu pada model pengembangan kurikulum salah satunya yaitu “model administratif”, dengan menempuh tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 ialah Studi Kelayakan dan Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum melakukan perumusan. Berbagai pertimbangan melalui kebijakan yang berlaku dan menganalisis kebutuhan. Secara teoritis Analisis kebutuhan dapat dilakukan terhadap: (a) kebutuhan peserta didik, terutama aspek perkembangan psikologis, seperti bakat, minat, dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki, baik kompetensi akademik, kompetensi sosial, kompetensi personal, maupun kompetensi vokasional; (b) kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; (c) kebutuhan pembangunan (Nasional dan Daerah). Studi kelayakan meliputi program yang akan dikembangkan, rasional pengembangan, rumusan deskripsi tugas secara umum, analisis tugas secara khusus, rumusan kemampuan yang akan dikembangkan, analisis kebutuhan program sesuai dengan rumusan kemampuan yang akan dikembangkan.¹¹⁷

Data analisis kebutuhan di Mts Negeri 2 Ponorogo perlu adanya pengembangan kurikulum program SKS yang awalnya *by Class* menjadi *by School* sebagai salah satu program unggulan yang dimiliki MTs negeri 2 Ponorogo. Pelaksanaan program SKS *by School* dalam seleksi peserta didik, memperhatikan tingkat kecepatan belajar tiap-tiap peserta didik, dengan

¹¹⁷ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, 43.

memperhatikan tingkat kecepatan belajar yang relatif sama pada kelompok setiap mata pelajaran. Pada awal semester peserta didik mengikuti proses pembelajaran sesuai tuntutan KD yang sama. Setelah itu dilakukan penyeleksian menggunakan nilai rapot di semester 1, jika ditemukan peserta didik yang memiliki nilai IP minimal 92, maka peserta didik tersebut layak untuk masuk kelas percepatan. Untuk menentukan minat, bakat dan kompetensi-kompetensi lainnya madrasah mengadakan tes IQ kepada peserta didiknya. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, lulusan Program SKS *by School* ini diharapkan lulusan dapat melanjutkan pendidikan dan diterima di sekolah favorit baik dalam kota maupun luar kota. Dalam kebutuhan pembangunan nasional, tujuan adanya program SKS ini ialah terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, berkerjasama, berkomunikasi dll.

Sedangkan untuk studi kelayakannya MTs Negeri 2 Ponorogo ditunjuk sebagai sekolah yang menerapkan program SKS *by School* atas beberapa pertimbangan-pertimbangan yaitu : (a) Ditunjuk oleh Dirjen Pendis sebagai *Pilot Project* atau sebagai madrasah percontohan se-Jawa Timur. Karena telah melaksanakan program SKS sudah lama dikenal dengan Program SKS *by Class* dengan lulusannya dapat melanjutkan pendidikan serta diterima di sekolah lanjutan favorit baik dalam kota maupun luar kota. Dalam pelaksanaannya warga sekolah sangat mendukung karena program SKS ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki MTs Negeri 2 Ponorogo. Selain itu MTs Negeri 2 Ponorogo melampirkan data-data kelengkapan terkait madrasah penyelenggara

program SKS ke Dirjen Pendis dan dinyatakan lolos dalam seleksi madrasah penyelenggara Program SKS.

2. Tahap 2 ialah Perencanaan kurikulum

Pada Tahapan ini, Pengembangan kurikulum menyusun suatu konsep perencanaan awal kurikulum. Perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi dalam standar nasional pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum diperlukan kerangka kerja (*frame work*) agar perencanaan kurikulum tersusun secara sistematis dan terorganisir. Pada pendekatannya perencanaan kurikulum di MTs Negeri 2 Ponorogo menggunakan pendekatan “*Administrative Approach*” merupakan kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi, *From The Top Down*, dari atas ke bawah atas inisiatif para administrator. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan, semua ide, gagasan dan inisiatif berasal dari pihak atasan.¹¹⁸

Perencanaan kurikulum Program SKS *by School* yang dilakukan MTs Negeri 2 Ponorogo mengikuti peraturan dari Kanwil yang mengeluarkan kebijakan SK Dirjen Pendis Nomor 2851 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan SKS dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: memiliki akreditasi A dari BAN S/M, memiliki pedoman penyelenggaraan SKS, memiliki sumber daya manusia yang memadai, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang

¹¹⁸ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 149.

memadai, memiliki perpustakaan dengan referensi yang mencukupi, memiliki sarana literasi, mendapatkan izin penyelenggaraan SKS dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam. Didukung dengan adanya program SKS yang telah diterapkan sudah lama dengan nama program SKS *by Class*. Adapun Tahapan dalam perencanaannya ialah : Pertama-tama madrasah ini sebagai penyelenggara SKS kepada Kanwil Kemenag Provinsi dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait SKS dalam SK Dirjen Pendis Nomor 2581 Tahun 2019, selanjutnya Kanwil Kemenag melakukan verifikasi kelayakan madrasah, sekiranya madrasah sudah layak dalam pelaksanaan program SKS maka turun surat izin penyelenggaraan SKS dari Dirjen Pendis. Selanjutnya, Kepala Madrasah menunjuk bawahan untuk mengelola pelayanan program SKS khususnya untuk kelas percepatan dengan sistem pembelajaran, guru yang mengajar, dll. Untuk menunjang pelaksanaannya MTs Negeri 2 Ponorogo tak lupa mengirim perwakilan warga madrasah untuk mengikuti workshop dan penataran terkait pelaksanaan program SKS *by School*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembang kurikulum Program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo berjumlah 18 orang meliputi : waka kurikulum, kepala madrasah, pengelola SKS, komite, kepala TU.

3. Tahap 3 Pengembangan Rencana untuk Melaksanakan kurikulum

Pada tahap ini, pengembang kurikulum membuat rencana operasional kurikulum, yang meliputi penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar, seperti buku sumber, modul, narasumber, dan sebagainya. Rencana pelaksanaan ini hendaknya

memperhatikan faktor waktu, tenaga, biaya, dan kemungkinan pelaksanaannya di lembaga pendidikan.¹¹⁹

Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum yang dilakukan MTs Negeri 2 Ponorogo ialah: Pengembangan silabus mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, sedangkan untuk RPP disusun dan dikembangkan sebagai acuan pengembangan UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM merupakan suatu inovasi pembelajaran untuk jenjang madrasah yang menyelenggarakan program *SKS by School*. Dalam pelaksanaannya waktu belajar anak percepatan sama dengan kelas bilingual dan reguler, Yang membedakan ialah beban belajar yang mereka dapatkan. Media pembelajaran UKBM menggunakan Buku teks pelajaran/BTP yang memuat KI dan KD setiap mata pelajaran, memuat tugas dan pengalaman belajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan sebagai alat evaluasi diri. Selain itu adanya kegiatan dari pengelola program SKS / kelas percepatan antara lain : kegiatan outdoor, outbound, mabit, pondok UN, dkk di setiap ajaran barunya, Pengelola mengikuti kalender akademik madrasah dalam menyusun program untuk kelas percepatan. Guru diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik di luar jam pelajaran sebagai upaya menambah atau mengulangi penjelasan materi kepada peserta didik kelas percepatan yaitu adanya program klinik pembelajaran.

¹¹⁹ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, 44.

4. Tahap 4 ialah Pelaksanaan uji coba lapangan

Tujuan uji coba di lapangan adalah untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, hambatan, atau masalah apa yang terjadi, bagaimana pengaruh lingkungan, faktor-faktor apa yang mendukung, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan atau pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan uji coba terbatas, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan keandalan program, kemampuan guru, dan tenaga teknis, instrumen evaluasi, kelengkapan sumber-sumber belajar, dan kriteria keberhasilan. Kegiatan uji coba meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian. Uji coba biasanya dilakukan pada kelompok sampel yang representatif.¹²⁰

Dalam tahapan pelaksanaan uji coba lapangan, MTs N 2 Ponorogo tidak melaksanakannya karena MTs Negeri 2 Ponorogo telah menerapkan program SKS sudah lama, telah menjadi madrasah *Pillot Project* di Jawa Timur, dan juga pelaksanaan secara teknis Program SKS by school mengikuti kebijakan dari Dirjen Pendis.

5. Tahap 5 Pelaksanaan kurikulum

Ada 2 Kegiatan yang perlu dilakukan, ialah :

- a. Kegiatan diseminasi yakni pelaksanaan kurikulum dalam lingkup sampel yang lebih luas
- b. Pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh yang mencakup semua satuan pendidikan pada jenjang yang sama.¹²¹

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 142–143.

Dalam pelaksanaan kurikulum di madrasah dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. ¹²²

Teori tersebut sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh kepala madrasah dan Pendamping akademik/ wali kelas percepatan dan juga merangkap sebagai guru di kelas percepatan. Dalam pelaksanaan oleh kepala madrasah menyusun sebuah perencanaan antara lain Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM), Kalender Akademik dan perencanaan lainnya, Menerbitkan SK pengelola SKS dan penugasan guru sebagai pembimbing Akademik (PA), Menyusun uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian penyelenggara SKS, membantu pengembangan profesional guru dalam menyusun dan melaksanakan layanan utuh unit-unit pembelajaran atau UKBM-UKBM, mengelola sarana dan prasarana pendukung layanan SKS dengan di bantu para waka dan Ketua TU.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, sehubungan kelas percepatan merupakan kelas khusus sehingga perlu adanya bimbingan ekstra terhadap peserta didik sehingga adanya perubahan wali kelas menjadi pembimbing akademik dimana tugas dari pembimbing akademik seperti halnya seorang orang tua yang harus untuk memahami peserta didik baik dalam kemampuan minat, bakat melalui bimbingan secara langsung dan tidak langsung. Bimbingan secara langsung seperti

¹²² Ibid., 173.

membimbing peserta didik dalam pengisian KRS sebelum KBM berlangsung, membimbing peserta didik dalam melakukan konsultasi akademik dengan memanfaatkan waktu-waktu yang efektif. Juga melalui daring dengan media sosial yang mereka buat bersama, dan secara berkala senantiasa memotivasi anak-anak bersama guru pembina lainnya. Sedangkan bimbingan tidak langsung antara lain :Membimbing peserta didik yang membutuhkan bimbingan belajar (remedial/ pengayaan) sebagai Pendamping akademik senantiasa komunikasi aktif dengan semua guru mapel, menetapkan agenda kegiatan untuk kegiatan peminatan mapel terpilih bersama tim kurikulum selanjutnya dilaksanakan di hari sabtu, membimbing dalam pembagian rapot peserta didik melalui orang tua wali dengan penyampaian data umum capaian belajar anak-anak. Selanjutnya terdapat sesi konsultasi dari orang tua wali dan bersama BK terkait perkembangan anak-anak.

6. Tahap 6 Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum

Pada tahap ini, pengembangan kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum, yang meliputi tahap masukan sesuai dengan desain kurikulum dan hasil atau dampak pelaksanaan kurikulum.¹²³ Pelaksanaan kurikulum di sekolah perlu dipantau untuk mengetahui tingkat efektivitasnya. Kurikulum perlu dipantau supaya pelaksanaannya tidak ke luar jalur.¹²⁴

¹²³ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, 44.

¹²⁴ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 219.

Dalam pemantauannya dilakukan dengan pemantauan terjadwal dan sidak oleh dinas terkait dan juga oleh kepala madrasah secara rutin. Selain itu, madrasah juga membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap tahunnya kepada Dirjen Pendis melalui sistem online. Selain diadakannya pemantuan terkait manajemennya juga diadakan pemantauan kepada peserta didik di kelas percepatan oleh guru mapel, Pendamping akademik dan juga BK

Setelah kurikulum diimplementasikan beberapa waktu lamanya, dengan pengertian bahwa kurikulum selalu diupayakan dalam kondisi siap untuk dikembangkan kembali dan diperbaiki kembali demi penyempurnaan, maka kurikulum tersebut perlu diadakan penilaian secara menyeluruh.¹²⁵ Dalam konteks sistem kurikulum, istilah yang tepat digunakan adalah evaluasi kurikulum.¹²⁶

Untuk pelaksanaan evaluasi kurikulum di madrasah menggunakan *model responsive*. Sebagaimana model iluminatif, model ini menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi diartikan sebagai pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program.¹²⁷ Mengevaluasi Kurikulum yang berlaku mencakup¹²⁸:

- a. evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru,

¹²⁵ Ibid., 237.

¹²⁶ Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, 266.

¹²⁷ Ibid., 290.

¹²⁸ Samsila Yurni dan H. Erwin Bakti, "Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Laporan Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palembang Sumatra Selatan, Progran Studi Administrasi Pendidikan,(tth)*, t.t., 303.

- b. Evaluasi desain kurikulum,
- c. Evaluasi hasil belajar siswa,
- d. Evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data, dalam pelaksanaan evaluasi meliputi efektivitas prosedur pelaksanaan SKS *by school*, tenaga pendidik (guru), modul pembelajaran, dan teknik-teknik dalam mengajar. Selain dalam proses manajemen evaluasi juga dilakukan untuk peserta didik meliputi Penilaian dilakukan selama pelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai (penilaian hasil/produk) dimana hasilnya berupa nilai raport setiap semesternya.

7. Tahap 7 Perbaikan dan penyesuaian

Berdasarkan penilaian dan pemantauan kurikulum diperoleh data dan informasi yang akurat, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pada kurikulum tersebut bila diperlukan, atau melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan. Perbaikan dilakukan terhadap beberapa aspek dalam kurikulum tersebut.¹²⁹

Beberapa jenis pendekatan untuk memperbaiki kurikulum yang masing-masing berdasarkan pada tujuan tertentu. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perbaikan kurikulum di MTs Negeri 2 Ponorogo yaitu *Pendekatan Sistem Pendidikan*.

Pendekatan Sistem Pendidikan adalah metode yang sistemik dan logis yang memberikan kemudahan dalam perbaikan kurikulum. Pendekatan ini bersifat menyeluruh. Sistem ini menyediakan rencana yang

¹²⁹ Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, 143.

berdasarkan kebutuhan dimana didalamnya telah tercakup pula tuntutan evaluasi yang diperlukan, dan keterlibatan waktu para staf dan sumber-sumber, sejak tingkat perencanaan sampai tingkat pelaksanaan program pendidikan. Pendekatan sistem pendidikan merupakan alat dalam melakukan usaha perbaikan.¹³⁰

Kepala Madrasah menyatakan tindak lanjut dari adanya pemantauan dan penilaian ialah madrasah meningkatkan apa yang masih menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program SKS ini. Kemudian setelah itu pada setiap tahunnya dilakukan perbaikan. Akan ditampilkan selalu feedback dalam pelaksanaan program yang telah dijalankan, mulai dari masukkan di bagian kanwil, komite maupun wali murid. Hambatan yang dialami madrasah dalam pelaksanaan program SKS by School ini cukup beragam, mulai dari siswa, guru dan pengelola. Akan tetapi dalam setiap bulannya diadakan rapat pembahasan mengenai program SKS by school guna pemaparan masalah yg dihadapi dan mendiskusikan solusinya.

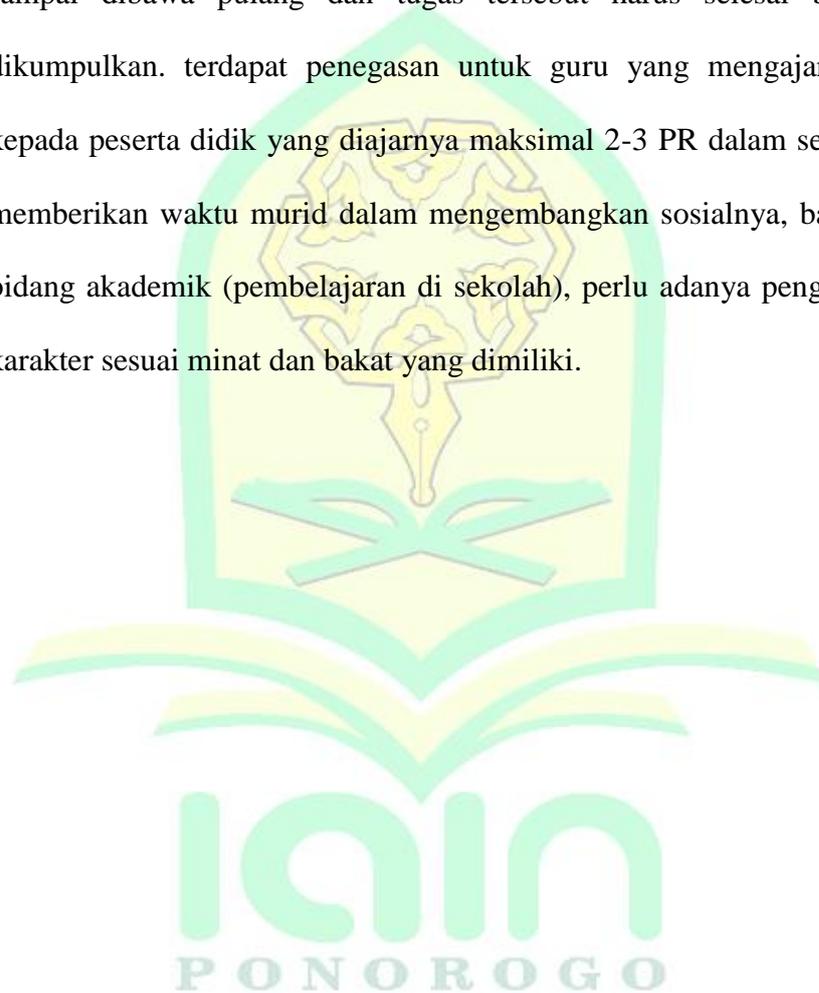
Keterlibatan siswa dalam perbaikan kurikulum didasarkan pada asumsi bahwa para siswa memiliki kebebasan untuk meminta dan menerima dan kebebasan memilih dan berbuat, termasuk hak untuk menerima atau menolak pengajaran yang diberikan oleh sekolah.¹³¹

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data, ialah peserta didik kurang mampu membagi waktunya karena tugas banyak dan pulang sore, ditambah jika ada PR atau tugas kelompok yang mengharuskan

¹³⁰ Ibid., 293.

¹³¹ Ibid., 285.

dikumpulkan dalam waktu dekat sehingga berharap dan meminta kepada pihak madrasah meminta guru mapel untuk mengurangi tugas yang diberikan kepada siswa. Hal tersebut telah menjadi titik fokus pihak pengelola dengan memberikan solusi . Seluruh Guru mapel kelas percepatan tidak boleh memberikan PR yang membebani / menyulitkan peserta didik sampai dibawa pulang dan tugas tersebut harus selesai besok dan dikumpulkan. terdapat penegasan untuk guru yang mengajar bertanya kepada peserta didik yang diajarnya maksimal 2-3 PR dalam sehari untuk memberikan waktu murid dalam mengembangkan sosialnya, bakat diluar bidang akademik (pembelajaran di sekolah), perlu adanya pengembangan karakter sesuai minat dan bakat yang dimiliki.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan mengenai desain pengembangan kurikulum pada madrasah yang menerapkan program Sistem Kredit Semester di MTsN 2 Ponorogo menghasilkan kesimpulan bahwa MTs Negeri 2 Ponorogo mengalami pengembangan kurikulum yang awalnya program SKS by Class berubah menjadi program SKS by School. Pengembangan program SKS yang dilakukan MTs Negeri 2 Ponorogo sebagai wujud dalam mempertahankan program unggulan yang dimiliki MTs Negeri 2 Ponorogo. Pengembangan kurikulum mengacu pada model pengembangan kurikulum yaitu The Administrative Model, Dalam pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap yaitu :

Tahap 1 adalah studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik untuk program SKS saat ini adalah memperhatikan minat, bakat dan kompetensi peserta didik dengan memperhatikan tingkat kecepatan belajar yang relatif sama pada setiap mata pelajaran. Menyeleksi peserta didik di semester 2 dengan persyaratan peserta didik memperoleh nilai IP minimal 92 untuk di masukkan dalam kelas percepatan; kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dengan adanya suatu target madrasah kepada lulusannya untuk melanjutkan pendidikan dan diterima di sekolah favorit baik dalam kota maupun luar kota; kebutuhan pembangunan adanya program SKS diharapkan peserta didik terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad ke-21 yaitu berpikir kritis, bertindak kreatif,

bekerjasama, berkomunikasi dll. Studi kelayakan terfokus pada program yang akan dikembangkan, rasional pengembangan, deskripsi tugas secara umum, analisis tugas secara khusus, rumusan kemampuan yang akan dikembangkan, analisis program sesuai dengan rumusan kemampuan yang akan dikembangkan. Studi kelayakan dalam pelaksanaan Program SKS *by School* yang dilakukan MTs Negeri 2 Ponorogo atas beberapa pertimbangan yaitu Telah ditunjuk oleh dirjen Pendis sebagai madrasah percontohan di wilayah Jawa Timur, melaksanakan program SKS sudah lama, lulusannya dari program SKS dapat melanjutkan pendidikan dan dapat diterima di sekolah favorit dan juga lolos dalam pemberkasan sekolah yang menerapkan program SKS *by School*.

Tahap 2 adalah perencanaan kurikulum, Perencanaan kurikulum program SKS diperlukan kerangka kerja (*frame root*) yaitu dikeluarkannya keputusan Dirjen Pendis Nomor 2851 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Tsanawiyah.

Tahap 3 adalah pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum, yang meliputi penyusunan silabus diatur dalam permendikbud nomor 22 Tahun 2016, pengembangan bahan ajar dengan UKBM (Unit Kegiatan Belajar Mandiri) sebagai inovasi pembelajaran, dan menentukan sumber-sumber belajar melalui modul atau buku teks pembelajaran yang memuat KI dan KD setiap mata pelajaran.

Tahap 4 adalah pelaksanaan uji coba dilapangan untuk mengetahui kemungkinan keberhasilan kurikulum dan hambatan yang terjadi, MTs Negeri

2 Ponorogo tidak melaksanakan uji coba dalam pelaksanaan Program SKS *by School*

Tahap 5 adalah pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2 tingkatan yaitu: tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan ialah kepala sekolah dengan dibantu oleh para waka dalam menyusun RKT, RKAM, kalender akademik, penugasan guru dan pendamping akademik, mengelola sarpras, mengkoordinir pembelajaran guru menggunakan UKBM. Ditingkat kelas Adanya komunikasi secara aktif Pendamping akademik untuk membimbing peserta didik di awal semester dalam pengisian KRS, membimbing peserta didik yang membutuhkan bimbingan belajar, sebagai perantara antara guru dan peserta didik, memotivasi peserta didiknya dan di akhir semester melakukan pembagian raport peserta didik kepada wali murid dan bersama guru BK mengadakan sesi konsultasi terkait perkembangan peserta didik.

Tahap 6 adalah pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum, pemantauan kurikulum program SKS dilakukan secara terjadwal oleh kepala madrasah dan sidak oleh dinas terkait. Selain itu menyetorkan Laporan Pertanggungjawaban setiap tahunnya kepada Dirjen Pendis secara online. Untuk pelaksanaan penilaian atau evaluasi meliputi efektivitas prosedur pelaksanaan program SKS, Tenaga pendidik, modul pembelajaran, teknik guru dalam mengajar dan juga adanya penilaian proses dan penilaian hasil atau produk.

Tahap 7 adalah perbaikan dan penyesuaian dengan menggunakan pendekatan sistem pendidikan yang dinyatakan oleh kepala madrasah bahwa

adanya feedback dari hasil pemantauan dan penilaian kurikulum program SKS mengenai hambatan yang dialami madrasah dalam penyelenggaraan SKS, nantinya di semester selanjutnya dilakukan perbaikan. Faktor utama dalam perbaikan pelaksanaan program SKS terfokus pada permasalahan peserta didik.

B. Saran

Berdasarkan analisis kesimpulan hasil penelitian di atas penelitian, maka ada sejumlah saran yang patut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum program SKS di MTs Negeri 2 Ponorogo:

1. Adanya keterlibatan semua guru dalam pengembangan program SKS di Madrasah. Guru dapat memberikan aspirasinya untuk masukan ke arah perbaikan kurikulum karena guru sebagai pelaksana program SKS di kelas (pelaksana kegiatan pembelajaran), mengingat dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum guru dijadikan sebagai partisipan saja. Solusi ini dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan yang dialami peserta didik yang kurang mampu membagi waktunya karena tugas banyak. Adanya koordinasi antar guru dengan di dampingi kepala sekolah dan beberapa staf pengembang kurikulum untuk guru menyusun silabus dan RPP sebagai salah satu cara dalam kegiatan pemantauan perencanaan pengembangan kurikulum agar pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Aziz, Abdul. “Memahami fenomena sosial melalui studi kasus.” *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 2003.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. 3 ed. Indonesia: Pustaka Pelajar, 2015.
- Direktorat KSKK Madrasah Rektorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian RI 2019. “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Tsanawiyah,” t.t.
- Fuadi, Salis Irvan. “Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Sistem Kredit Semester (SKS).” *PARAMUROBI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2018): 71–83.
- Ghoni, Djunaidi, dan Fauzan Almansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hamid, Hamdani. *Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hidayat, Sholeh. *Manajemen kurikulum*. bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- J, Lexy, dan Moloeng. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Moesthafa, Indra. “Manajemen Kurikulum Sistem Kredit Semester dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Probolinggo.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

- Muhlis, Achmad. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kurikulum dengan Model Sistem Kredit Semester di Madrasah." *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2016): 116–130.
- NAFIA, MUKHAMMAD ILMAN. "PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI SMA NEGERI 1 KUDUS." PhD Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Narbuko, Cholid, dan Habu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurdin, Diding, dan Imam Sibaweh. *Pengelolaan Pendidikan Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- "Pengamat Pendidikan: Program Akselerasi Bisa Memengaruhi Psikis Murid." *kumparan*. Diakses 30 September 2020. <https://kumparan.com/millennial/pengamat-pendidikan-program-akselerasi-bisa-memengaruhi-psikis-murid-1538137079141820340>.
- Primajaya, Vicky Adi, dan Nanik Indahwati. "Pengembangan UKBM Berbasis Identifikasi KD dan Pengambilan Semester pada Mata Pelajaran PJOK Jenjang SMA yang Mengimplementasikan Sistem Kredit Semester." *Jurnal Teladan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 2 (2019): 135–140.
- Ricky P.D, Mariyana. "KURIKULUM 2013 : Kelas Akselerasi Dihapus Tahun Depan, Ini Gantinya," 9 Oktober 2014. <https://m.solopos.com/kurikulum-2013-kelas-akselerasi-dihapus-tahun-depan-ini-gantinya-543037>.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis : Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Shulhan, Muwahid, dan Soim. *Manajemen pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suna, Agis, dan Dwi Wabula. "Implementasi Kebijakan Program Peserta Didik Cerdas Istimewa (PDCI) dengan Model Sistem Kredit Semester (SKS) di MTS Negeri 2 Kediri." *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 1–9.

Supriyanto, Eko. "Model Penguatan Sekolah Madrasah Untuk Melayani Siswa Berkecerdasan Tinggi Melalui Implementasi Pembelajaran Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS)." *Profetika Jurnal Studi Islam* 17, no. 02 (1 September 2017): 15-28–28.
doi:<https://doi.org/10.23917/profetika.v17i02.5294>.

"Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." Bidang Dikbud KBRI Tokyo, t.t.

Wahid, Abdurrahman. "Penerapan Program Sistem Kredit Semester (SKS) Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 3 Jakarta." *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2016): 21–37.

Yurni, Samsila, dan H. Erwin Bakti. "Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Laporan Hasil Penelitian Universitas Muhammadiyah Palembang Sumatera Selatan, Progran Studi Administrasi Pendidikan,(tth)*, t.t.





